



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT
PANJA PENGAWASAN PENEGAKAN HUKUM KOMISI III DPR RI**

Tahun Sidang	: 2019 – 2020
Masa Persidangan	: IV
Rapat ke	: -
Jenis Rapat	: RDP
Dengan	: Kepala Badan Reserse Kriminal Polri
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Senin, 6 Juli 2020
Pukul	: 14.00 WIB – 16.00 WIB
Tempat	: Markas Besar POLRI, Jl. Trunojoyo No.3 Jakarta
Ketua Rapat	: Dr. Ir. Adies Kadir, S.H., M.Hum.
Sekretaris	: Novianti, S.E.
Acara	: Pengawasan pelaksanaan penegakan hukum terhadap pengelolaan sumber daya alam
Hadir	: A. Anggota DPR RI : 22 orang Anggota dengan rincian:

PIMPINAN

4 orang Pimpinan dari 5 orang Pimpinan:

1. Dr. Ir. H. Adies Kadir, SH., M.Hum
2. H. Desmond Junaidi M., SH.,MH.
3. Ir. Pangeran Khairul Saleh, MM

1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN:

3 orang Anggota:

1. Masinton Pasaribu
2. Arteria Dahlan
3. H. Safaruddin

2.FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:

3 orang Anggota:

1. Ir. Hj. Sari Yuliati, MT.
2. H. Andi Rio Idris Padjalangi, SH., M.Kn.
3. Supriansa, S.H., M.H.

/3. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

3.FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA:

3 orang Anggota:

1. Habiburokhman, SH., MH
2. Romo H.R. Muhammad Syafi'i, SH., M.Hum
3. Wihadi Wiyanto, SH., MH.

4.FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT:

2 orang Anggota:

1. Taufik Basari, SH, M.Hum., L.L.M.
2. Eva Yuliana, M.Si.

5.FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:

2 orang Anggota:

1. H. Moh. Rano Al Fath, SH., MH. (virtual)
2. N. M. Dipo Nusantara Pua Upa, SH., M.Kn.

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

3 orang Anggota:

1. Ir. H. Mulyadi
2. Didik Mukrianto, SH., MH.
3. Dr. Benny K. Harman, SH.

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

1 orang Anggota:

1. Habib Aboe Bakar Al-Habsyi, SE

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

1 orang Anggota:

1. Sarifuddin Sudding, SH., MH.

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:

0 orang Anggota dari 1 orang Anggota:

--

B. UNDANGAN

Kepala Badan Reserse Kriminal Polri beserta jajaran

JALANNYA RAPAT:

KETUA TIM PANJA (Dr. Ir. ADIES KADIR, S.H., M.Hum.):

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Selamat siang

Salam sejahtera bagi kita semua

Om swastiastu

Namo buddhaya

Salam kebajikan

*Robbis Rohlii Shodrii, Wa Yassirlii Amrii,
Wahlul 'Uqdatam Mil Lisaani Yafqohu Qoulii Amma Ba'du*

Yang saya hormati Pimpinan Komisi III Pak Desmond
Yang saya hormati Pak Roni
Yang saya hormati Bapak Ibu Anggota Panja Pengawasan Penegakan
Hukum Komisi III DPR RI
Yang terhormat Kabareskrim atau Pak Wakabareskrim
Beserta seluruh jajaran yang hadir pada kesempatan siang hari ini

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya lah pada kesempatan hari ini kita bisa hadir dalam Rapat Dengar Pendapat dengan keadaan sehat *wal aflat* tanpa kurang suatu apapun.

Bapak Ibu sekalian

Saya atas nama Tim Pengawasan Panja Penegakan Hukum mengucapkan terima kasih atas waktu dan tempat yang diberikan oleh Kabareskrim beserta jajaran dalam RDP pada siang hari ini.

Selanjutnya kami akan memperkenalkan Anggota Panja yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Saya sendiri Dr. Adies Kadir, S.H., M.Hum. Wakil Ketua Komisi III sekaligus dipercaya oleh seluruh kawan-kawan untuk menjadi Ketua Panja Penegakan Hukum Komisi III DPR RI. Kemudian di sebelah kanan saya Bapak Desmond Junaidi Mahesa dari Fraksi Gerindra, kemudian ada Bapak sebelah kanan saya ada Pak Ahmad Sahroni dari Fraksi NasDem.

Ketiga, kemudian dari Fraksi PDIP ada Pak Trimedya Panjaitan, kemudian ada Pak Masinton Pasaribu, kemudian ada Bapak Arteria Dahlan, Pak Arteria yang paling ganteng ini Pak. Kemudian ada Pak Dr. Safaruddin.

Dari Fraksi Partai Golkar ada Ibu Sari Yulianti, kemudian ada Bapak Andi Rio Idris Padjalangi, ada Pak Supriansa.

Kemudian dari Fraksi Gerindra ada Pak Habiburokhman ...(suara tidak jelas) Jakarta, ada Pak Romo H.R. Muhammad Syafi'i, ada Bapak Wihadi Wiyanto.

Kemudian dari Fraksi NasDem ada Pak Taufik Basari, kemudian ada Ibu Eva Yuliana *wong Solo niki* Pak.

Kemudian dari PKB Pak Cucun Ahmad Syamsurijal sudah hadir? Dia rapat Banggar Pak. Kemudian Mohammad Rano Al Fath, kemudian Pak Dipo Nusantara Pua Upa.

Dari Fraksi Partai Demokrat ada Pak Mulyadi (suara tidak jelas), ada Pak Didik Mukrianto, ada Pak Benny Kabur Harman. Kok kita tidak lihat Beliau-Beliau Pak, Ketua dari Ketua ini Pak Benny ini.

Kemudian Habib Aboe Bakar Alhabsyi, Bapak Achmad Dimiyati Natakusumah. Bapak Sarifuddin Sudding dari PAN, dan terakhir Pak Arsul Sani dari PPP masih ada kesibukan lain.

Bapak Ibu sekalian

Agenda kita hari ini pertama tentunya kita akan mendengarkan ulasan dari Pak Kabareskrim terkait dengan apa yang kita sampaikan, dan dialog tanya jawab, dan diakhiri dengan penutup. Sebelum itu kami ingin mendapat persetujuan mengenai waktu kita akan akhiri ini pada pukul 14.30 WIB paling lambat ya? Setuju 14.30 WIB paling telat kalau 15.00 selesai kita akhiri. Setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

Baik Bapak Ibu sekalian

Kami sedikit sampaikan Pak Kabareskrim bahwa Komisi III telah membentuk Panja Pengawasan Penegakan Hukum dan ...(suara tidak jelas) daripada pembentukan Panja ini ada tiga *cluster* yang kami capai kami ...(suara tidak jelas) bahwa pertama terkait dengan sumber daya alam sebagai *illegal mining, drilling, fishing*, dan lain-lain. Kemudian ada *cluster* Kelembagaan saya ingin tahu sejauh mana Kelembagaan yang ada di daerah kita ini sudah menjalankan penegakan hukum baik itu di jajaran-jajaran penegak hukum sendiri maupun di luar penegak hukum seperti itu Bea Cukai, Imigrasi, dan lainnya dan ada *cluster* umum terkait dengan kasus-kasus yang mencuat yang terkini di tengah masyarakat.

Oleh karena itu, kami minta dengan hormat Pak Desmond menyampaikan *highlight* daripada pengawasan penegakan hukum ini yang intinya adalah Panja Penegakan Hukum ingin agar supaya kami dapat membantu Pemerintah dalam mengamankan aset-aset negara dan dapat menambah anggaran pendapatan negara dari hal-hal yang disalahgunakan oleh oknum baik itu di bidang sumber daya alam maupun di bidang-bidang lainnya. Kami persilakan yang terhormat Pak Desmond Junaidi Mahesa.

F-GERINDRA (H. DESMOND JUNAIDI MAHESA, S.H.,M.H.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Sejahtera bagi kita semua

Yang saya hormati Kaba dan Wakaba dan jajaran Bareskrim

Pada penjelasan Ketua Panja ada 3 *cluster* yang jadi koncern Panja Penegakan Hukum. Panja Penegakan Hukum ini adalah Panja Penegakan Hukum dalam rangka meningkatkan pendapatan negara. Tiga cluster itu

adalah langkah-langkah yang kami rasa kami pikirkan pada saat alasan kami perlu pembentukan Panja ini. Misalnya sumber daya alam banyak hal sumber daya alam yang harus kita cermati misalnya *illegal drilling* diganggu, banyak hal laporan Komisi per bulan itu triliunan dari *illegal drilling* yang ada di Jambi, yang ada di Jawa Timur, yang ada di Sumatera Selatan, yang ada beberapa sumur tua di Kalimantan ...(suara tidak jelas) itu semuanya ada yang hari ini yang akan sentuh secara maksimal tentunya tujuan Panja ini agar hal-hal yang hari ini tidak tersentuh bisa tersentuh ke depan. Tujuan kami bertemu dengan Pak Kabareskrim dan jajaran dalam rangka menyamakan *tune*-nya persepsinya agar tidak ada perbedaan dalam kerangka kerja ke depan.

Ada apa dengan *illegal drilling* yang harus kita antisipasi bersama dan ada penegakan hukum ada pendapatan negara begitu juga dengan hal-hal yang *illegal* batubara di Kalimantan dan Sumatera Selatan misalnya atau Jambi, mana penegakan hukum mana pendapatan negara. Kenapa? Karena pengalaman saya sebagai orang Kalimantan koridor-koridor itu kan lahan, misalnya di Kalimantan Timur banyak koridor yang hari ini masih berlaku atau masih ditambah dan pemainnya itu-itu saja. Bagaimana dengan di Kalimantan Selatan yang dua minggu terakhir Pak Kapolda menangkap juga ilegal yang dilakukan oleh Saudara orang kuat yang ada disana alat-alatnya punya Saudaranya dia. Yang ilegal-ilegal ini kan pada penataannya dalam rangka penegakan hukum dan pendapatan negara karena ini berkaitan dengan kerusakan-kerusakan lingkungan juga ada biaya yang ...(suara tidak jelas) itu ada apa dengan dana-dana pada saat APKP ini dimulai dengan Dana Jaminan Reklamasi yang hari ini juga tidak jelas tanggung jawabnya apakah ada di Pemerintah Pusat apakah ada di Pemerintah Daerah. Begitu juga dengan Tambang Timah di Bangka, kita melihat kasus timah di Bangka ada aset negara yang luasnya luar biasa yang dikelola sama PT. Timah tapi juga ada perusahaan-perusahaan yang swasta ada pula surat yang dikeluarkan Kementerian tentang pola kemitraan agar masyarakat bisa menikmati hasil melibatkan masyarakat mengambang di PT. Timah. Ketentuan di kemitraan harusnya dijual ke PT. Timah. Gubernur dengan tambang-tambang pengusaha bikin perusahaan kita tahu itu tidak ditambang tapi penampung PT. Timah kawan-kawan di Depnaker sangat paham ini terjadi di kasus-kasus seperti ini dalam rangka ada penegakan hukumnya ada pendapatan negaranya.

Ada apa dengan *illegal fishing*, dari sekian banyak persoalan-persoalan sumber daya alam dan penegakan hukum dalam pendapatan negara tentunya kita harus mempersamakan *tune*-nya agar kita tidak menyerang institusi-institusi Kepolisian dalam konteks penegakan hukum disinilah perlu ada dialog-dialog antara Panja dengan pihak Kepolisian untuk menyamakan persepsi atau saling membesarkan agar ada penegakan yang maksimal ada pendapatan yang maksimal di dalam sumber daya alam. Ada apa dengan kelembagaan-kelembagaan yang juga bagian meningkatkan persoalan-persoalan pendapatan. Banyak yang bisa kita umumkan kelembagaan-kelembagaan yang merugikan.

Nah ini juga harus kita respon kenapa dengan kasus-kasus umum yang sifatnya diadakan dadakan nah catatan-catatan inilah yang sebenarnya

sebelum kami turun ke lapangan hari ini kami datang ke Kejaksaan datang ke Kepolisian akan datang ke KPK dalam rangka menyamakan tune-nya. Nah hari ini Komisi III dengan Mabes Polri khususnya di Bareskrim itu menyamakan *tune*-nya nanti Anggota banyak kasus-kasus yang akan dipaparkan tapi tidak harus dibahas kasusnya karena hak ini adalah *case* evaluasi yang tentunya kedepan kemungkinan Komisi III kekurangan datanya untuk melangkah kita mengharapkan bantuan dari pihak Kepolisian untuk memperkuat dalam rangka penegakan hukum dalam rangka meningkatkan pendapatan negara. Begitu juga sebaliknya kedepan kira-kira kawan-kawan Panja ini mau diapain gitu loh dalam artian mana yang harus disuarakan oleh Panja Penegakan Hukum dalam rangka memperkuat Institusi Kepolisian dalam rangka memperkuat Institusi Kepolisian. Mungkin ada yang membuat Institusi Kepolisian sedang diomongkan kasih informasi ke Panja ini kita bisa untuk bantu sebagai *speaker* dan merangka melakukan tindakan-tindakan hukum dan pendapatan negara.

Ini *highlight*, terima kasih Pimpinan.

KETUA TIM PANJA (Dr. Ir. ADIES KADIR, S.H., M.Hum.):

Baik, terima kasih Pak Desmond Juniadi Mahesa. Untuk mempersingkat waktu kami persilakan Pak Kabareskrim untuk menyampaikan paparannya.

KEPALA BARESKRIM (Komjen. Pol. Drs. LISTYO SIGIT PRABOWO, M.Si.):

Terima kasih.

Yang terhormat Pimpinan Komisi III DPR RI dalam hal ini Pak Panja, Bapak Dr. Ir. Adies Kadir yang saya hormati
Yang saya hormati Bapak Desmond Junaidi selaku Pimpinan Komisi III
Selanjutnya Ahmad Sahroni selaku Pimpinan Komisi III
Serta seluruh Saudara-Saudara kami
Rekan Anggota Panja Komisi III DPR RI
Serta seluruh segenap Pejabat dari jajaran Komisi III yang kami muliakan

Sebelum kami memulai memaparkan terkait dengan adanya beberapa pertanyaan yang sudah dikirim duluan dan kami akan kami jawab. Mohon izin perlu kami laporkan dulu bahwa pada saat ini kami hadir bersama dengan rekan-rekan Pejabat Utama dan sebelah kiri saya Pak Wakabareskrim, kemudian Pak Irjen. Pol. Wahyu Hadiningrat, kemudian mulai dari sebelah kanan Direktur Ekonomi Khusus Pak Dirjen Helmy Santika, kemudian Direktur Tipidter, Brigjen. Pol. Syahar Diantono, kemudian Dir. Siber Brigjen Pol. Slamet Uliandi, kemudian Diritpidum Brigjen Ferdy Sambo, kemudian Korwas PPNB Bapak Brigjen Pol. Prasetijo, kemudian Pak Karorenmin sebentar lagi jadi Brigjen Pak Hadi Cahyo, kemudian Kapus Pelapor. Dilanjutkan Kapus Kapus Siknas Kapus Siknas, kemudian selanjutnya Kapus Kinapes, selanjutnya Pak Karobinop Pak Boli, selanjutnya Dir Tipikor Pak Joko, selanjutnya adalah Direktur Narkoba Bareskrim Polri, kemudian kami juga

diikuti oleh rekan-rekan dari Kasubdiv di Direktorat Tipidter serta rekan-rekan Kasubdiv terkait.

Yang kami muliakan Pimpinan Panja

Mohon izin sesuai dengan draf pertanyaan yang telah kami peroleh sebelumnya maka kami akan mencoba menguraikan beberapa pertanyaan tersebut dan kemudian mohon izin selanjutnya terkait dengan hal-hal khusus nanti akan kami jelaskan secara khusus.

Ada pertanyaan pertama mohon izin kami kami bacakan terkait dengan penegakan hukum terhadap perkara di sektor sumber daya alam dalam rangka menyelamatkan keuangan negara agar dijelaskan berapa jumlah laporan Polisi, berapa jumlah SPDP yang dikirim ke Kejaksaan, jumlah perkara yang di P19 atau berkas yang harus kami lengkapi untuk kemudian dikirimkan kembali Kejaksaan dan perkara yang telah P21. Mohon izin kami jawab bahwa berdasarkan data yang dimiliki oleh Bareskrim Polri mulai dari periode Januari sampai Juli 2020 terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam kami laporkan sebagai berikut bahwa ada 161 LP yang berkaitan dengan tindak pidana pertambangan mineral dan batubara dimana 77 SPDP telah dikirim ke Kejaksaan 23 adalah status P19 dan 64 perkara telah P21. Kemudian ada 180 laporan perkara yang berkaitan dengan tindak pidana pengelolaan sumber daya minyak dan gas, 164 SPDP telah dikirim Kejaksaan, 6 dalam status P19 dan 16 telah P21. 15 laporan polisi yang terkait dengan tindak pidana perikanan, 15 telah di SPDP dikirim Kejaksaan dan seluruhnya telah P21. Kemudian 143 laporan Polisi terkait tindak pidana kehutanan dimana 135 telah kami kirim SPDP-nya ke Kejaksaan, 2 dalam status P19 dan 15 perkara telah P21 sedangkan sisanya sedang diproses. Kemudian 113 laporan polisi terkait dengan tindak pidana pembakaran hutan dan lahan yang terdiri dari 68 LP korporasi 45 LP perorangan 12 SPDP telah dikirim ke Kejaksaan 1 dalam status P19 dan 2 perkara dalam status P21.

Kemudian pertanyaan yang kedua adalah pola koordinasi dan kerja sama Polri dengan instansi terkait baik penegak hukum maupun instansi lainnya dalam rangka pencegahan dan penegakan hukum yang berorientasi untuk mencegah kebocoran di sektor penerimaan negara dan penyelamatan keuangan negara. Mohon izin kami jelaskan bahwa pola koordinasi dan kerja sama yang dilaksanakan yang telah dilaksanakan Polri saat ini adalah antara lain adalah dengan membuat perjanjian kerja sama dengan Kementerian ataupun BUMN terkait. Ini menindaklanjuti dari MoU yang telah dibuat oleh Bapak Kapolri dengan Kementerian terkait sebagai contoh misalkan kami membuat perjanjian kerja sama dengan SKK Migas kemudian juga dengan Pertamina terkait dengan beberapa kegiatan yang kaitannya melaksanakan kegiatan yang tadi disampaikan Pak Pak Bapak Pimpinan yaitu terkait dengan masalah *illegal drilling* termasuk juga upaya kami untuk melakukan pengawalan terhadap beberapa proyek pembangunan kilang strategis mulai dari kegiatan asistensi sampai dengan proses penegakan hukum terhadap permasalahan-permasalahan di lapangan sehingga progres tersebut bisa tepat waktu.

Kemudian kami juga melaksanakan komunikasi dan kolaborasi serta tukar menukar informasi dan juga di dalam situasi tertentu kami melaksanakan joint investigasi ini dimaksud untuk bisa melakukan penegakan hukum secara lebih tepat kemudian komprehensif karena kami berjalan bersama-sama dan kemudian bisa tukar-menukar informasi pada saat proses tersebut dilaksanakan. Kegiatan yang lain adalah kami memberikan pelatihan-pelatihan terhadap PPNS sehingga kemudian PPNS-PPNS yang ada di Kementerian terkait mereka siap untuk melaksanakan tugas-tugas penegakan hukum terkait dengan sumber daya alam dimaksud. Berkoordinasi dengan Kejaksaan untuk menyamakan persepsi dalam memperjelmahkan aturan hukum dan pemberian tindak pidana. Kemudian melakukan ekspos-ekspos terkait juga dalam upaya menyamakan persepsi sehingga prosesnya bisa berjalan dengan lancar.

Kemudian dalam upaya penegakan hukum yang berorientasi mencegah kebocoran di sektor penerimaan negara dan penyelamatan keuangan negara terhadap pelaku-pelaku, ke depan kami akan terapkan tindak pidana pencucian uang sehingga ini merupakan bagian dari langkah-langkah kami dalam hal upaya mengoptimalkan proses pengembalian kerugian negara ataupun paling tidak kami bisa menyita aset-aset yang kemudian itu bisa dikembalikan kepada negara.

Kemudian terkait dengan kerugian negara yang berhasil diselamatkan dan belum diselamatkan namun berpotensi untuk diselamatkan dalam kurun waktu Januari sampai dengan Juni terkait dengan tindak pidana pertambangan mineral dan batubara kami telah menyelamatkan dan ini rencana akan kami kembalikan ke negara nanti dengan (suara tidak jelas) senilai Rp 17.931.579.000 dan estimasi kandungan ini khususnya terkait dengan masalah pembalakan atau penambangan ilegal di hutan lindung Pak ini kalau ini kita biarkan maka kerugian negara bisa-bisa mencapai kurang lebih Rp 190.000.000.000 ini belum semuanya Pak ini masih dilokasi-lokasi yang saat ini sedang kami proses.

Kemudian terkait dengan sumber daya minyak dan gas sebagaimana telah kami sampaikan sebelumnya bahwa kami telah membuat kegiatan kerja sama untuk penahanan terhadap hal-hal seperti yang tadi dimaksud *illegal drilling* dan seterusnya kami selamatkan saat ini Rp 6.601.590.842. Kemudian ditingkat pidana perikanan kami telah menyelamatkan uang kurang lebih Rp 27.900.591.000. Sedangkan kerugian-kerugian negara akibat tindak pidana kehutanan dan kebakaran hutan dan lahan belum bisa diprediksi secara-secara untuk masalah penghitungan kerugian negara namun demikian potensi kerugian negara yang berhasil kita selamatkan adalah bahaya dan dampak terjadinya kerusakan lingkungan sumber daya alam yang kita lihat ini tidak bernilai eh ternilai dan tentunya ini juga sebagai bagian dari upaya untuk masa depan bangsa kita negara kita manakala kita mampu menjaga sumber-sumber daya alam kita baik yang ada di dalam tanah maupun yang di atas permukaan.

Adapun pertanyaan pertanyaan keempat terkait tentang tantangan dan hambatan yang dihadapi Polri dalam penegakan hukum beberapa hal yang

kemudian menjadi catatan kami adalah di bidang pertambangan mineral dan batubara ada beberapa permasalahan khususnya yang menyangkut lokasi yang berada di *remote area* sehingga secara geografis ini sulit dijangkau dampaknya adalah dengan jauhnya jarak tersebut ini tentunya memudahkan para pelaku-pelaku tersebut untuk mengadakan kegiatan-kegiatan dalam bentuk kegiatan penambangan ilegal. Kemudian yang sering kami dapati khususnya ini tambang emas yang ilegal atau peti ini kebanyakan memang dilakukan oleh masyarakat kecil sehingga ini pada saat kami lakukan penindakan ada potensi rawan konflik sosial.

Kemudian untuk tambang-tambang yang lain di luar emas biasanya dilakukan oleh pengusaha-pengusaha dengan menggunakan alat berat sebenarnya mereka secara umum mampu sebenarnya, namun karena ingin mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi mereka melakukan kegiatan-kegiatan tersebut secara ilegal di hal-hal seperti ini kadang kala kami agak kesulitan pada saat harus mengevakuasi barang bukti seperti excavator dan mesin-mesin yang tentu memerlukan biaya tinggi. Terkait dengan pengumpulan barang bukti pada saat ini tentunya kami perlu semakin melengkapi terkait dengan masalah geografi sehingga perlu adanya alat-alat khusus yang juga perlu diawali dengan anggota-anggota yang memiliki keterampilan khusus sebagian ini sudah dipenuhi di tahun anggaran 2020. Namun ke depan tentunya kami ingin lebih meningkatkan lagi sehingga dalam upaya-upaya kami terkait dengan masalah penegakan hukum yang terkait dengan kekayaan negara ini bisa lebih optimal.

Kemudian yang kelima masalah pertambangan tanpa izin ini biasanya terkoordinir dan melibatkan oknum setempat sehingga pada saat kita mau melakukan aksi penegakan hukum ini sering terjadi kebocoran dan kemudian juga adanya potensi-potensi pelawanan dari kelompok penambangan akibat provokasi dari pelaku yang berpotensi dan kemudian ada juga karena kebocoran tersebut mereka kabur dan kemudian menghilangkan barang bukti.

Di bidang sumber daya alam berupa minyak gas dan bumi rata-rata banyak sumur-sumur yang kemudian mereka gali atau biasa disebut dengan *illegal drilling* ini berada di lahan milik warga dan belum ada pembebasan lahan oleh Pertamina sehingga tentunya pada saat penegakan hukum ada risiko terjadinya penolakan perlawanan maupun resistensi namun demikian tentunya ini bukan menjadi alasan kita untuk tidak melakukan penegakan hukum.

Kemudian selanjutnya adalah banyak juga penutupan lubang sumur yang tidak permanen sehingga dapat dilubangi kembali oleh para pelaku.

Kemudian terkait dengan kendala di bidang perikanan pola kejahatan di laut yang berubah-ubah karena beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian terkait dengan regulasi waktu penyidikannya terlalu singkat yaitu 30 hari di Pasal 73 Ayat (B) Ayat (6) Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 bahwa penyidik harus menyampaikan hasil penyidikan ke penuntut umum paling lama 30 hari sejak dimulainya

penyidikan. Kendalanya dihadapi ketika penyidik sudah melakukan penyidikan atau upaya bangsa tapi pelakunya belum tertangkap. Kemudian terkait dengan masalah benih lobster ini juga beberapa waktu yang lalu banyak sekali terjadi penyelundupan benih lobster dengan tujuan Singapura yang dilakukan oleh nelayan kecil yang kemudian bekerja sama dengan pengepul dan seterusnya disatu sisi pada saat kita melakukan penegakan hukum kita berhadapan dengan kelompok-kelompok masyarakat kecil juga sering kami tangkap di level pengepul atau orang yang akan melakukan penyelundupan langsung ke luar negeri ini juga tentunya menjadi masalah-masalah yang harus dihadapi di dalam bidang penegakan hukum.

Kemudian di bidang kehutanan banyak ditemukan kegiatan masyarakat seperti pemukiman dan sarana ...(suara tidak jelas) yang berada di dalam kawasan hutan karena masih kurangnya sosialisasi belum semua Pemerintah Daerah mempunyai RT RW yang dipadukan serasi dengan peta kehutanan sehingga sulit untuk menerapkan penegakan hukumnya khususnya pada saat masyarakat tersebut sudah berada di dalam lokasi-lokasi tersebut. Kemudian terkait dengan aturan tidak sinkronnya aturan tentang perizinan mekanisme perolehan izin penggunaan pemanfaatan kawasan hutan memungkinkan terjadinya kegiatan usaha di dalam kawasan hutan, contohnya izin usaha pertambangan dan perkebunan dalam kawasan hutan. Kemudian perizinan lingkungan yang merupakan syarat izin usaha tidak pindahkan contoh tanpa AMDAL UKP RW ditunjukkan telah diterbitkan izin usaha di dalam pertambangan dan perkebunan. Kemudian hal-hal lain waktu penyidikan terlalu singkat maksimal 90 hari jadi ini juga menjadi kendala manakala di satu sisi kita juga harus melaksanakan beberapa penegakan hukum secara bersamaan dengan kasus yang berbeda-beda sehingga waktu ini kemudian dirasa kurang mencukupi.

Kemudian juga perlunya kita harus ke TKP yang berada di dalam kawasan hutan ini juga tentunya menjadi hambatan karena untuk masuk ke lokasi tersebut memang memerlukan waktu yang tentunya akan mengurangi waktu penyidikan sehingga waktunya semakin-semakin sempit sehingga tentunya ini menjadi masalah-masalah tersendiri. Kemudian JPO juga kadang kala belum siap untuk melakukan penyidikan lanjutan. Kemudian Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 menanamkan bila waktu paling lama 2 tahun harus terbentuk lembaga pencegahan dan pemberantasan perusakan tanaman hingga saat ini lembaga tersebut belum terbentuk. Dan selanjutnya kemudian di bidang kebakaran hutan dan lahan kondisi geografis karhutla yang sangat sulit sehingga mendatangi TKP tidak bisa dilakukan dengan cepat dan menunggu api benar-benar padam, struktur tanah lahan gambut ini menyulitkan pada saat dilakukan pemadaman. Kemudian juga pendapat TKP-TKP yang sulit dijangkau oleh transportasi darat. Kemudian saksi-saksi ditindak pidana karhutla minim dan sulit dicari karena TKP pada umumnya jauh dari lingkungan aktivitas masyarakat.

Kemudian selanjutnya alih dan laboratorium terkait dengan tindak pidana karhutla masih terbatas dan memerlukan biaya besar sementara kejadian karhutla sering terjadi secara bersamaan sehingga untuk proses penyidikan membutuhkan waktu yang lama. Kemudian tindak pidana karhutla

sangat bergantung pada hasil lab dan keterangan ahli, faktor alam juga menjadi pemicu terjadinya kebakaran yang bersifat masim seperti musim panas yang berkepanjangan atau biasa disebut El Nino dan area yang terbakar merupakan lahan gambut yang sudah mudah terbakar. Ada tradisi masyarakat yang kemudian ini juga diakomodir di dalam undang undang yang melakukan upaya-upaya pembakaran hutan karena kearifan lokal mengatur hal demikian ini juga tentunya menjadi penyebab terjadinya kebakaran dan disatu sisi penegakan hukum juga menjadi kendala karena adanya aturan tersebut. Kemudian terkait dengan petunjuk operasional dari Mahkamah Konstitusi bagaimana dilakukan upaya penegakan hukum terpadu antara penyidik PPNS, Kepolisian dan Kejaksaan di bawah koordinasi Menteri ini masih belum ada petunjuk operasionalnya.

Mohon izin Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang mulia

Kami masukkan juga masalah karhutla ini karena memang ke depan kita akan menghadapi musim kering yang panjang sehingga tentunya masalah karhutla ini betul-betul menjadi perhatian beberapa waktu yang lalu Bapak Presiden juga mengingatkan kembali agar kita harus siap-siap untuk menghadapi karhutla sehingga kemudian beberapa langkah telah dilakukan mulai dari kami pada saat itu mendampingi Pak Panglima dan Kapolri untuk meninjau Provinsi Riau dan Kepri untuk mengecek kesiapan menghadapi karhutla pada tanggal 12 Februari 2020 dan pada saat itu Bapak Kapolri telah me-*launching* aplikasi Lancang Kuning dimana aplikasi Lancang Kuning ini bisa kita gunakan untuk memonitor TP hotspot kemudian juga Anggota yang ada di sekitar hotspot bisa kemudian kita hubungi dan kemudian bisa kita gerakan untuk segera datang ke TP-TP hotspot tersebut apabila memang terjadi kebakaran maka mereka segera bisa menghubungi Satgas yang terkait dengan karhutla untuk kemudian dilakukan pemadaman termasuk juga mereka bisa melaporkan kondisi terkini setelah mereka melakukan pemadaman karena memang aplikasi ini tersambung dengan satelit sehingga kita bisa mendapatkan beberapa gambaran secara ...(suara tidak jelas) kemudian termasuk arah angin sehingga pada saat kita melakukan pemadaman itu bisa dilaksanakan dengan arah yang benar termasuk juga lokasi-lokasi Posko Keadilan. Terkait dengan hal tersebut Kapolri telah menginstruksikan 12 Polda yang rawan karhutla untuk juga mengadopsi aplikasi tersebut mulai dari Polda Riau, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumsel, Kalteng, Kalbar, Kaltara, Kaltim, Kalsel dan Babel. Kemudian juga disiapkan posko-posko siaga karhutla dimana isinya TNI, Polri, dan relawan anti api dimana Satgas tersebut dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran dan *water bombing* untuk melakukan memonitor secara...(suara tidak jelas) melakukan penanganan karhutla secara tepat dan tuntas.

Kemudian kami juga kontrol bagaimana ambung-ambung api yang ada di lokasi tersebut untuk selalu siap digunakan pada saat terjadi kebakaran, kemudian bersama dengan Pemerintah Daerah membentuk Brigadir karhutla di tingkat Kecamatan, Kelurahan, Kabupaten dan Provinsi. Mohon izin itu kira-kira aplikasi Lancang Kuning yang kita siapkan jadi setiap hari Anggota memonitor tersebut memonitor di situ akan terlihat kalau ada *detect* warna

merah maka kemudian nanti akan kita cek nanti akan terlihat Anggota yang ada di sekitar pos-pos tersebut sehingga kemudian bisa kita gerakan. Kemudian beberapa upaya kita lakukan antara lain, mendorong kerusakan besar juga untuk melakukan terobosan dalam upaya pencegahan dan pemadaman karhutla dengan melakukan upaya-upaya untuk membantu masyarakat yang akan membuka lahan untuk tidak membakar namun mereka menyiapkan atau menyediakan alat berat sampai dengan radius tertentu misalkan radius 5 km ini di *cover* oleh rekan-rekan dari perusahaan tersebut ini juga sebagai bentuk kepedulian terhadap upaya-upaya pencegahan. Kemudian juga melakukan upaya-upaya seperti membentuk membuat Desa Peduli Api sehingga masyarakat terdorong untuk melakukan langkah-langkah pencegahan terhadap pemadam kebakaran tersebut yang diakibatkan oleh kegiatan membuka hutan dengan kearifan local. Jadi ini pelan-pelan kita geser sehingga kebiasaan membakar lahan yang dilakukan yang memang ini diatur juga di dalam undang undang ini bisa perlahan-lahan kita atasi.

Kemudian beberapa hal yang menjadi catatan kami tentunya harapan kami kedepan adalah bagaimana terkait dengan aturan ini ataupun pasal yang ada di dalam undang undang tersebut bisa dihilangkan sehingga kedepan tidak ada lagi pembukaan hutan dengan menggunakan metode kearifan lokal yang berdampak terhadap permasalahan kebakaran hutan. Kemudian seperti kami uraikan di depan bahwa kami telah melakukan beberapa kerja sama terkait dengan masalah penanganan pelanggaran penegakan hukum di bidang minyak dan gas jadi kami pernah membuat buat kerja sama dengan SKK Migas kemudian dengan Pertamina seperti yang tadi kami sampaikan kegiatan yang sudah dilakukan mulai dari sosialisasi kepada pelaku penambangan kemudian rapat koordinasi dan mengeluarkan surat maklumat larangan eksplorasi dan eksploitasi minyak tanpa izin, mengamankan distribusi fisik BBM baik melalui jalan darat maupun laut, kemudian pemasangan larangan *illegal drilling*, melakukan penutupan dan tentunya juga melakukan upaya-upaya penegakan hukum terhadap *illegal drilling* maupun *illegal tapping* yang terjadi di beberapa wilayah yang tadi sempat disampaikan oleh Pimpinan yaitu di Jambi, kemudian juga di beberapa tempat di Jawa Timur.

Dari kegiatan yang telah kami lakukan terjadi peningkatan terhadap *lifting* atau produksi minyak walaupun ini belum besar tapi ini akan terus kita tingkatkan pada saat itu pada saat kita melaksanakan ada peningkatan kurang lebih 500 barel per hari karena kami mendapatkan informasi bahwa terjadi kehilangan terhadap produksi minyak akibat *illegal drilling* dan *illegal tapping* ini yang tentunya merugikan negara dalam hal ini dari Pertamina dan juga menjadi tanggungan dari rekan-rekan yang ada di SKK.

Kemudian langkah-langkah yang telah dilakukan tentunya mulai dari kegiatan pre-emptif, preventif, sampai dengan represif. Kegiatan-kegiatan ini mohon izin sudah kami laksanakan dari beberapa waktu yang lalu sempat terhenti karena memang saat kemarin terjadi pandemi Covid-19 sehingga untuk pergerakan Anggota dan juga fokus kegiatan kami bergeser kepada upaya-upaya penanggulangan pandemi Covid-19. Namun demikian seiring

dengan kegiatan *new normal* maka kami mulai fokus kembali ke beberapa kegiatan khususnya yang terkait dengan sumber daya alam.

Mungkin demikian sementara penjelasan yang bisa kami sampaikan atas beberapa pertanyaan yang telah diajukan kepada kami semoga dapat menjadi pertimbangan dari Bapak-bapak dan Ibu Anggota Panja yang kami hormati, selanjutnya nanti akan kami jelaskan secara khusus terkait dengan beberapa materi yang mungkin jadi materi tambahan sebagai salah satu contoh tadi masalah situasi pertambangan timah di Babel mungkin yang yang menjadi salah satu topik yang tentunya akan diskusikan dalam rangka masukkan bagi kegiatan Panja Penegakan Hukum. Demikian kami akhiri terima kasih.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Shaloom
Om Shanti Shanti Shanti Om*

KETUA TIM PANJA (Dr. Ir. ADIES KADIR, S.H., M.Hum.):

Wa'alaikumsalam Warahmatullahi

Terima kasih Pak Wakabareskrim atas paparannya jadi memang hal-hal yang belum dijawab pada kesempatan siang hari ini kami nanti mohon dijawab tertulis mungkin juga kami akan mengundang ke Komisi III untuk melakukan pembahasan secara khusus terkait dengan hal-hal tersebut kami juga akan mencari masukan juga di lapangan di lokasi yang berkaitan terkait hal-hal seperti disampaikan tadi di Bangka Belitung itu. Jadi banyaknya ...(suara tidak jelas) apa penambang-penambang ilegal yang mana apa aparat penegakan hukum agak kesulitan untuk melakukan pengamanan kegiatan usaha pertambangan mengingat keterbatasan personil dan tempat yang jauh-jauh.

Kemudian selain di Bangka Belitung ada juga di Jambi itu terkait dengan meningkatnya kasus *illegal logging* 2018-2019 kami mencatat kerugian negara kurang lebih 13,5 milyar. Kemudian beberapa ini di salah satu tempat saja Pak, triliun mungkin iya iya 13 triliun hambatan-hambatan hukum bidang *illegal logging*, *illegal drilling* juga seperti itu, kemudian ada lagi di Sulawesi Tenggara Sulawesi Tenggara terkait dengan pertambangan nikel ada beberapa PT-PT yang terakhir ada dua kasus laporkan ke Timsus Polda Sultra terbaru Mabes Polri bersama Polda Sultra juga 17 Maret sudah menyita jumlah alat berat dan lainnya kami nanti ingin mendengarkan sejauh mana pembahasannya tertulis saja Pak nanti.

Kemudian di Lampung ada Gulaku kasus 2018 terkait dengan penguasaan-penguasaan lahan. Kemudian di bidang ekonomi juga ada beberapa terkait dengan Indosurya Cipta dan Wanaartha, kemudian Indo Karya, kemudian kasus PT. Anugrah di Sumut terkait dengan kebun sawit 500 hektar, kasus Inalum kasus pertambangan juga begitu. Kemudian ada tekstil ilegal juga, ada *illegal fishing* kami akan memberikan Pak nanti data-datanya yang kami perlukan jawaban agar supaya nanti bisa dijawab tertulis

karena menurut catatan yang kami terima periode 2014-2019 itu di Kaltim ada 14 kasus, di Jatim ada 8 kasus, Sulawesi Tengah ada 9 kasus, Tambang Emas ada 23 kasus, Batubara 23 kasus, pasir besi 11. 2018 Polri juga mencatat 240 kasus pertambangan, di Polda Kaltim ada 29 kasus di 2019, di Kalsel masih marak illegal maining, Polda Kalsel 4 bulan terakhir menjadi 14 kasus dan menetapkan 29 orang tersangka.

Kemudian kami juga terkait dengan kasus-kasus yang umum kami mohon Barekrim juga lebih memelototi Pak terkait dengan unit-unit terpadu perlindungan-perlindungan perempuan dan anak ini banyak sekali penyalahgunaan oleh oknum-oknum baik itu di sekitar Jakarta Bogor Bekasi sampai di Lampung yang barusan kemarin itu petugas-petugasnya anak-anak perempuan wanita yang sampai hamil sampai memiliki anak ini harus mulai di ini juga Pak jadi panti-panti asuhan ini mungkin perlu ada pemeriksaan khususnya terkait dengan ...(suara tidak jelas) surat-surat izin dan lain-lainnya karena bukannya mengasuh anak tapi membuat anak bahkan ada yang dijual-jual juga gitu anak-anak yang diasuh tersebut mohon perhatiannya.

Baik Bapak Ibu sekalian

Nanti kami akan serahkan secara detail Pak dari Komisi III kita akan kirimkan agar supaya dijawab langsung dijawab secara tertulis oleh Kabareskrim. Mungkin ada masukan dari beberapa kawan kami.

F-PAN (SARIFUDDIN SUDDING, S.H., M.H.):

Baik Ketua.

KETUA TIM PANJA (Dr. Ir. ADIES KADIR, S.H., M.Hum.):

Kami mulai.

ANGGOTA PANJA:

Daftar Ketua.

KETUA TIM PANJA (Dr. Ir. ADIES KADIR, S.H., M.Hum.):

Baik kami mulai dari Pak Arteria Dahlan silakan.

ANGGOTA PANJA:

Ya Ketua.

KETUA TIM PANJA (Dr. Ir. ADIES KADIR, S.H., M.Hum.):

Pak Arteria dulu tadi ada utang di Kejaksaan.

ANGGOTA PANJA:

Oh ada utang dia, oke.

KETUA TIM PANJA (Dr. Ir. ADIES KADIR, S.H., M.Hum.):

Pak Arteria silakan.

F-PDIP (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.):

Terima kasih Pak Ketua.

Pertama saya sepakat kita sudah penyamaan persepsi Komisi III sudah punya *based line* merugikan keuangan negara ya kriminal berskala besar dan berpotensi untuk menambah atau menyelamatkan keuangan negara. Batasan ini harus terkonfirmasi juga di Kepolisian jangan sampai nanti temen-temen di Kepolisian sulit sendiri cari kasus sendiri yang dianggap itu yang hebat ini yang besar Pak bukan yang versinya DPR yang besar. Nah kemudian bicara dengan ...(suara tidak jelas) mengenai dampak penegakan hukum negara mengenai ruginya keuangan negara, Gubernur tidak kooperatif, adanya dampak sosial, demo, kerusuhan yang nilai jangan Polisi sendiri Pak kalau Bapak mengalami kesulitan seperti itu ya dikonfirmasi dulu ke kita jadi jangan wah kita tidak bisa begini kita harus ngambil kebijakan gini karena begini-gini menurut telaahan kami. Saya minta ya tolong dikonfirmasi juga ke kita DPR RI.

Kami juga ke depan harus juga memahami bagaimana visi misi maupun giat-giat penegakan hukum yang dihadirkan oleh Bareskrim kalau Pimpinan tadi mengatakan *tone*-nya harus sama frekuensinya harus sama sehingga tidak me apa merugikan pola kemitraan bahasa saya tidak hanya merugikan tidak memermalukan pola kemitraan artinya apa nanti di lapangan kita berhadap-hadapan ini kita koreksi Kapolda koreksi Dir karena urusan-urusan yang sebenarnya hitam putihnya sudah jelas tapi hanya hebat-hebatan kekuasaan. Saya ingin Pak Kaba punya peta dasar Pak bagaimana peta pengelolaan sumber daya alam data tindak pidana terkait dengan pengelolaan sumber daya alam ini harus sama datanya jangan sampai di Polres, di Polda, sama di Mabes sejarahnya beda-beda ya kita juga tahu sama tahulah belum tentu semua informasi disampaikan ke Bareskrim gitu.

Nah kemudian juga mengenai potret penanganan harus *firm* yang mana namanya tindak pidana perikanan, kehutanan, minerba, migas dan sebagainya saya mohon sekali Polri lahir dari rahim reformasi jadi juga harus bisa merefleksikan bagaimana konsep Undang-Undang Perikanan itu hadir sampai *ending*-nya nanti tindak pidana di bidang perikanan tidak hanya *illegal fishing* Pak apalagi kalau kita lihat *illegal fishing* hanya 20 sekian milyar kita punya 34 Polda 400 sekian kabupaten kota, cuma segitu.

Kemudian juga tindak pidana Kepabeanan berkali-kali nih saya minta tolong nih Kepabeanan bagaimana sih masalah LD tuh misalnya kan kita tidak bicara bagaimana kerjasama Polri sama Bea Cukai gitu loh. Untung Bang Helmi sudah punya potret saya, begitu saya kemarin nanya wah

potretnya begini, terima kasih Bapak Helmi. Begitu juga mengenai BUMN Pak jangan sampai nanti ada selingkuh terkesan Polisi sama BUMN ini kan juga bingung kita bagaimana *Corporate Agent...*-nya begitu dibuat terlalu memaksa ada *holding*, ada anak, ada induksi sehingga BUMN sendiri untungnya Rp 30.000.000.000 saya katakan tindak pidana juga Pak. Aksi-aksi korporasi yang menyimpang namanya.

Tadi dikatakan Pak Ketua mengenai pertambangan *illegal logging*, *illegal mining* kita tidak hanya *illegal mining* lah kita bicara lebih bahasa Indonesiannya menangani masalah peti, peti emas, kemudian peti timah dan sebagainya, bagaimana juga kejahatan mineral dan batubara minerba pasca undang undang ini hadir Pak undang undang ini begitu liberalnya mudah-mudahan nanti bisa tolong juga disikapi. Saya ingin minta tolong Pak Kaba kalau ada penyidikan aktor intelektual itu harus ketemu harus ada penyidikan lanjutan harus ada pengembangan perkara harus ada penuntutan TPPU Pak terkait dengan sumber daya alam harus ada gugatan atau perhatian terkaitantisipasi kita minta ganti rugi maupun juga pemulihan kerusakan lingkungan ini yang namanya *restorative justice* Polri gitu tapi belakangan kan tidak kelihatan ini.

Berikutnya saya juga ingin sampaikan bagaimana penyelidikan dan penyidikan yang aneh-aneh Pak manggilin orang tidak jelas manggilin orang pesenan ya kemudian yang tidak cocok udah masuk ke Dirtipideksus kayaknya tidak begitu enak nih tiba-tiba bisa diterima ...(suara tidak jelas) ya kan ini kan kasihan Pak Eksusnya sudah kerja benar tiba-tiba diterima di ...(suara tidak jelas). Saya tidak tahu jadinya kayak gimana. Kemudian juga kami juga minta betul bagaimana teman-teman kita harus lihat artinya apa harus mengerti dan paham aturan main undang undang yang sudah mengerti yang sudah paham ya tidak boleh mempermainkan hukum ya disini. Perkara yang satu jadi pelapor, yang satu jadi pelapor di Republik inilah dari Bareskrim ini lah yang paling banyak tadinya kita ngelaporin malah jadi terlapor Pak yang laporan kita tidak jalan malah kita jadi tersangka bagi kita lazim-lazim saja yang begini. Inikan tugas-tugas Pak Kaba yang harus juga Pak Kaba juga cermati. Saya juga sangat perihatin tadi jumlah perkaranya sangat sedikit sekali.

Berikut Pak Kaba ini masalah Sugar Group di Bareskrim ini sudah lama ini kelamaan sekali kasus. Gunawan Yusuf ini mau dikerjain atau tidak kalau tidak dikerjain bilangan Gunawan Yusuf orang yang paling kebal sedunia Pak siapa dibelakangnya Pak saya mau tahu Pak. Kemudian juga kami ingin nanti ada Panja khusus saya inisiasi pribadi Pak untuk terkait kasus Gulaku Pak Gunawan Yusuf biar tahu dan kita kelihatan nih siapa yang main disini Pak.

Berikutnya mengenai kasus Jambi yang disampaikan senior saya Pak Desmond, Pak Adies, itu kan sudah sangat terang benderang dan jelas kemarin saja Polisi sempat di serang Polsek atau apa yang luka itu yang ini mau kita apakan ini kan hanya apa karena yang satu punya pegangan yang satu punya pegangan berani lawan Polisi. Polisi bukan alat pengusaha Pak, polisi bukan temannya pengusaha, polisi adalah polisinya rakyat. Begitu juga

tambang timah di Bangka kalau memang ada alasan banyak konflik kepentingan banyak konflik kepentingan politik sekalipun kita tidak pernah dengar nih laporannya baru hari ini saya dengar tapi apa duitnya kan sudah mengalir Pak sudah masuk tuh ke kantong-kantong orang Pak, baru setelah di gas setelah dilakukan penekanan wah ada masalah Pak Gubernur masalah tekanan politik tekanan begini-begini-begini. Nah, besok Panja ini juga kita akan cermati betul tidak ada alasan kalau Bapak kerja benar kita *backup* tapi kalau kerjanya main-main ya tidak kita *backup* itu loh.

Kemudian berikut lagi mengenai masalah diferensiasi, saya mohon sekali Pak jangan sampai perkara orang sudah masuk di Eksus bisa masuk ke Tipikor bisa masuk ke Tripung pindah-pindah saja ini perkara Pak ya walaupun siapapun yang minta tolong kalau saya katakan kita harusnya kepastian hukumnya juga harus didapat. Kami juga mohon sekali bicaranya mengenai masalah kepastian hukum Polri ini sebenarnya benar orangnya kan makin lama hebat-hebat pintar-pintar hebat-hebat cuma sekarang ini kasihan kepala tangan badan sama kaki beda-beda perintahnya ini loh, kasihan saya teman-teman disini juga hebat-hebat semua tapi memang intervensinya begitu tinggi nah ini juga harus menjadi tugas Pak Kaba ini.

Saya kasih contoh di Kalimantan Selatan kita bicara kebakaran hutan ada lima apa yang kena perusahaan satu bisa lepas kenapa perbuatannya serupa dan sebangun setahun yang lalu tapi saya diam saja serupa sebangun empat kena satu lepas. Berikutnya juga nih kita terkonfirmasi kalau misalnya Bapak ada copot orang siapapun yang diganti Dir diganti ya Dir diganti jangan sampai orang meraba Dir diganti karena ada kasus ini karena ada ...(suara tidak jelas) ini harus *clear* Pak sehingga kerja-kerjanya tugas-tugas teman-teman ini juga terlindungi secara, secara hukum dan politik hukumnya.

Kami juga melihat minta tolong banyak sekali Pak, penyidik yang sama memeriksa di suatu tempat pada suatu waktu tertentu kemudian disuruh lagi sama atasannya di suatu tempat pada waktu tertentu di hp-nya beda jadinya orangnya sama yang meriksa yang diperiksa juga sama, mau kita bawa kemana muka Polri kalau memang kita tidak serius untuk melakukan giat-giat penegakan hukum, orangnya sama ini tapi tahun ini beda karena yang nyuruhnya juga beda. mungkin itu saja tentunya kami berharap betul jangan sampai nanti di lapangan pada saat Panja ini bekerja terjadi irisan-irisan kepentingan saya yakin kepentingan suatu kepentingan kita kan merah-putih bagaimana keadaan kita bisa lebih baik lagi penegakan hukum kita bisa lebih baik lagi. Mungkin itu saja Ketua, terima kasih.

KETUA TIM PANJA (Dr. Ir. ADIES KADIR, S.H., M.Hum.):

Baik terima kasih, Pak Arteria.

F-PAN (SARIFUDDIN SUDDING, S.H., M.H.):

Pimpinan, kanan.

KETUA TIM PANJA (Dr. Ir. ADIES KADIR, S.H., M.Hum.):

Iya Pak Sudding, sebentar Pak Sudding.

F-PAN (SARIFUDDIN SUDDING, S.H., M.H.):

Baik.

KETUA TIM PANJA (Dr. Ir. ADIES KADIR, S.H., M.Hum.):

Tahan dulu dari Kejaksaan.

F-PD (DR. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):

Baik, mohon maaf Pak Sudding saya duluan.

Seluruh Pimpinan Panja, Pimpinan Komisi ya,
Pimpinan Komisi, Pimpinan Panja
Pimpinan Kabareskrim dan Pejabat Utama di lingkungan Mabes Polri

Saya memulai Pak Ketua dan Pak Kaba saya terus terang senang datang walaupun ini bukan tradisi Komisi III datang mengunjungi kelas-kelas Kaba atau kelas-kelas Jam-Jam ini tapi ya tidak apa-apa untuk institusi ya boleh lah. Tentu tujuan dan maksudnya adalah ingin mengawal tugas Bapak Ibu sekalian menegakkan hukum yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam. Kita mendukung sepenuhnya hanya saya mohon maaf dalam dua tahun belakangan ini kami mengamati tidak sedikit Anggota kita yang ikut terlibat dalam konflik-konflik yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam. *Illegal-illegal mining* yang tadi disebutkan itu berada Pak Ketua di depan mata institusi Kepolisian institusi Polisi membiarkan semua proses ini terjadi saya rasa bukan kali ini ini tradisi sebelumnya juga. Tadi contoh di Bangka Belitung soal timah itu kan dari dulu, kemudian di Kalimantan soal tambang batubara dulu sama, kemudian di Sulawesi tambang nikel juga sama.

Jadi mohon maaf ada Anggota kita ya punya kepentingan ya mungkin pegang memegang saham yang mem-*backup* pengusaha tertentu apakah nama langsung biasanya nama keluarganya atau ... (suara tidak jelas) saya rasa ini hal biasa yang telah menjadi pemandangan kita. Saya punya data nama-nama Anggota setingkat Jenderal yang punya hubungan afiliasi tidak langsung dengan pengusaha-pengusaha tambang. Jadi memang mafia ini makin di zaman Presiden Jokowi ini makin merajalela. Mohon maaf saya ngomong terbuka mohon maaf saya ngomong terbuka kalau nanti dibutuhkan datanya saya buka kalau memang dibutuhkan tapi saya buka untuk apa kalau tidak ada gunanya ya mendingan kita bakar dan kita buang. Itu satu Pak ya.

Jadi intinya adalah Anggota-anggota Bapak teman-teman Bapak yang jadi pengawal pengusaha-pengusaha illegal itu Bapak mau apakan. Tadi teman-teman sudah ngomong dan dimana siapa-siapa Bapak juga sudah tahu apakah Bapak berani kami datang untuk mendukung Bapak disini

supaya punya keberanian untuk itu. Jadi kita kawal Bapak tapi Bapak jangan kawal pengusaha yang melakukan illegal mining itu.

Yang kedua, kalau kita mau sungguh-sungguh Pak Ketua Pimpinan Komisi kita lebih lanjut melakukan inspeksi lapangan ini yang disebut disini hasil-hasil tambang itu barang sitaan itu ditaruh dimana. Kita kan sudah punya pengalaman dulu dipaparkan di Komisi III barang sitaan sekian, ini sekian ini lalu saya ngeletuk nah ada tidak barang itu masih disimpan tidak, lalu dulu kita langsung ke lapangan ke Rubasan (Rumah Tempat Simpan Barang Sitaan) jadi beda sekali apa yang ada di atas kertas dan apa yang ada di lapangan jadi memang ya ya kita sama-sama tahulah. Jadi Pak Ketua kalau misal tidak serius kita ayo Pak kita ke lapangan Polisi tunjukkan kita jalan mana Pak kalau yang ditulis disini saya yakin itu sudah tidak ada hanya ditulis di atas kertas tapi barang ini sudah hilang. Mengapa hilang? Kita tidak tahu.

Kemudian yang berikutnya Pak, itu tadi ya saya mohon maaf kalau bisa tertibkan anggota-anggota Bapak itu sampai di tingkat Polsek. Sedihnya apa sedihnya mereka melakukan penyelidikan penyidikan yang bukan menjadi kewenangannya. Saya ada kasus bukan hanya satu bisa itu yang berkepentingan sudah lapor tapi Polisinya yang ngebet sekali lapor ke Polisi eh lapor ke apa melakukan pemeriksaan dan juga paksa-paksa Jaksanya supaya diproses sampai di Pengadilan padahal kan kita semua tahu ada namanya delik aduan dan delik umum ada jadi yang saya omong ini bukan-bukan impian kalau Bapak-bapak mau saya tunjukkan datanya saya akan tunjukkan tapi saya minta jaminan supaya yang bersangkutan diberhentikan kalau mau tapi kalau tidak saya tidak mau kasih.

Kemudian ini sama juga dengan contoh ya *illegal drilling* di sini sama tidak tahu lah ini yang ditulis di sini ini kecil sekali Pak tidak ada tidak ada nilainya ya, kemudian juga *illegal fishing* ya ditulis disini yang kecil-kecil saja, kemudian juga kehutanan, kehutanan ini juga menarik ini Pak ini kan PPNS ini sampai saat ini kan tidak jelas ini yang dimaksudkan dengan kawasan hutan itu apa, ada kawasan hutan yang ditetapkan sepihak oleh Kepala Desa oleh Dinas Kehutanan ya tempat wilayah tambang tidak jelas ya tapi tiba-tiba Polisi Kehutanan datang ya nangkap dengan alasan itu jadi memang di lapangan ini serba-serba ya mestinya Institusi Kepolisian memberikan kenyamanan untuk rakyat pelindung untuk masyarakat pengaman untuk masyarakat yang terjadi adalah sebaliknya.

Jadi ya mudah-mudahan Bapak selaku Pimpinan paling tinggi di Bareskrim ini mengambil alih tugas ini sebaik-baiknya sebab kunci Institusi Kepolisian ini kuncinya ada sama Bapak ini dari dulu kan kita sudah ngomong sama ya kalau kita mau menilai Institusi Kepolisian nilailah Bareskrimnya dan itu Bapak Kabareskrim yang menjadi komandannya. Saya tahu Pak karena karena ya teman-teman kita juga yang tadi, ya jagalah harga diri Pak jangan jadi pesuruh pengusaha lah jangan jadi pesuruh pengusaha. karena Anggota-Anggota Jenderal jadi pesuruh pengusaha jadi petugas pengusaha, malu sebetulnya tapi ya yang malu ya kita yang nonton ya.

Saya kemudian ingat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Sudding itu memang repot kita Pak ya saya hanya mohon ya kalau bisa Bapak lakukan saya juga mohon kepada Tuhan kalau mohon manusia juga tidak bisa lagi ya Tuhan kasihlah kekuatan kepada Kapolri kepada Kabareskrim, Waka, dan Pejabat-Pejabat Utama disini kasih kekuatan tapi kalau maksudnya supaya takut sama Tuhan kan begitu kalau omongan kita ya kayak gini kan tidak ditakuti lagi Pak Desmond, Pak Desmond boleh ngomong begitu di depan ya Anda saja tidak ditakuti apalagi akulah Anggota biasa ini kan. Nah kalau kepada kita saja tidak ditakuti ya kita mohonlah ngadu kepada Tuhan, Tuhan lihatlah orang-orang yang dikasih kuasa dikasih tugas untuk menegakan aturan hukum khususnya pengelolaan sumber daya alam. Ini saja Pak yang mau saya sampaikan mudah-mudahan berkenan, kalau mau yang detail-detail saya mohon waktunya kita buka lagi jangan hanya dua jam begini Pak Ketua sayangkan kita sudah datang capek-capek banyak lagi gini.

Saya tadi Kitas dua koper dokumen saya, saya siapkan kalau misalnya mau buka disini Aku buka begitu tapi dikasih tahu tadi kok cuma dua jam Pak Benny, tadi saya sudah mau pulang tadi ...(suara tidak jelas) tapi Pak Adies yang bilang janganlah Pak Ketua, ya sudah saya ikut sebagai Anggota tapi tolong Ketua jangan begini modelnya.

Terima kasih banyak.

KETUA TIM PANJA (Dr. Ir. ADIES KADIR, S.H., M.Hum.):

Terima kasih Bapak Ketua dari Ketua. Jadi nanti bahannya yang berjam-jam kita di DPR saja diskusinya. Kemudian selanjutnya Pak Sarifuddin Sudding silakan Pak Sudding.

F-PAN (SARIFUDDIN SUDDING, S.H., M.H.):

Baik, makasih Pimpinan.

Bapak Ibu Anggota Panja yang saya hormati
Pak Kabareskrim, Wakabareskrim, dan para pejabat utama Bareskrim beserta seluruh jajarannya saya hormati

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Selamat sore

Pertama saya memahami dan menghargai paparan yang disampaikan Pak Kaba tadi saya kira dengan upaya yang maksimal yang dilakukan jajaran Bareskrim sudah melakukan penyelamatan terhadap keuangan negara dan potensi untuk menyelamatkan keuangan negara juga kedepan masih terbuka ruang untuk itu. Dalam kaitan masalah Panja ini tadi sudah dijelaskan ada beberapa persoalan baik yang ada di pertambangan mineral, pertambangan minyak dan gas, perikanan, kehutanan dan kebakaran hutan dan lahan saya kira memang ini adalah pekerjaan yang sangat luar biasa yang harus dilakukan jajaran Bareskrim karena apa yang berkaitan dengan masalah illegal-illegal ini memang tidak lepas dari para elite, elite yang berada di lingkaran kekuasaan dan elite para pengusaha. Tadi disampaikan oleh Pak

Benny bahwa ya ketika persoalan integritas kawan-kawan di Bareskrim ini tidak terjamin dengan baik saya kira memang sangat sulit bagi kita dalam rangka penyelamatan kebocoran disana-sini dalam kaitan menyangkut masalah pertambangan ini karena orang yang terlibat dalam kaitan masalah pertambangan ini adalah orang-orang yang ada di lingkaran-lingkaran elite kan begitu dan juga berteman dengan Bapak Ibu semua.

Nah untuk itu Pak Kabareskrim saya hanya menitip harapan bahwa memang hal yang dikatakan oleh Pak Benny bahwa wajah Kepolisian itu ada di Bareskrim dan saya kira *conflict of interest* dalam kaitan menyangkut masalah penanganan kasus ini sedapat mungkin itu dapat tindakan tegakkanlah hukum dengan baik dalam rangka untuk kepentingan bangsa negara dan masyarakat.

Nah dalam kaitan menyangkut masalah penerimaan negara memang kita sadar benar bahwa penerimaan negara kita di bidang pajak ya dalam kaitan menyangkut masalah pertambangan ini, ini sangat rendah sekali. Tadi di Kejaksaan kita juga singgung menyangkut masalah *transfer pricing*, *transfer pricing* ini sumber pendapatan negara ...(suara tidak jelas) sungguh sangat besar prediksi itu terjadi *abuse*, *abuse of transfer pricing* banyak penyalahgunaan kayak apa modus penyalahgunaan di situ yang dilakukan oleh para pengusaha-pengusaha ini para pengusaha kelas kakap baik itu bidang tambang gas dan sebagainya kehutanan sawit dan sebagainya. Banyak contoh kasus masalah *transfer pricing* ini penerimaan pajak ini yang disalahgunakan dimanipulasi baik dalam konteks penjualan dan pembelian dan dimanipulasi dan itu sangat merugikan negara ini sumber pendapatan negara sangat besar Pak Kaba ketika ini betul-betul mampu di elaborasi menyangkut masalah *transfer pricing*. Nah itu saya pesan bahwa ketika kawan-kawan melakukan proses sidik terhadap kasus-kasus yang berkaitan menyangkut masalah pertambangan itu lebih komprehensif dan juga penekanannya ke masalah *transfer pricing* menyangkut masalah pajak karena hampir semua perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan pasti ada perusahaannya yang ada di luar dan disitulah terjadi permainan antara atas nama perusahaan yang ada di luar dengan yang ada di dalam terjadi permainan dalam jual beli sehingga itu menurunkan nilai itu terjadi manipulasi besar disitu Pak. Apa yang dilakukan oleh DL Sitorus apa yang dilakukan oleh banyaklah kalau saya sebut nama-nama disitu itu semua permainan *transfer pricing* Pak itu semua orang yang bergerak di bidang batubara mereka lakukan ini Pak penyelundupan pajak besar-besaran karena. Nah saya kira itu yang perhatian pertama saya.

Dan yang kedua tadi disinggung kawan-kawan menyangkut masalah PT. Timah di Bangka saya kira ini juga satu persoalan yang sangat besar Pak Kaba karena disamping merusak lingkungan juga ada permainan disitu. PT. Timah disampaikan oleh kawan-kawan ini selalu merugi sementara yang kaya raya itu adalah para pengusaha yang *partner*-nya dengan PT. Timah yang tidak tersentuh oleh hukum dan saya kira jajaran Kabareskrim tahu tentang pengusaha-pengusaha ini. Jadi mereka ada permainan di situ antara PT. Timah dan para pengusahanya jadi bukan ilegalnya dipersoalkan ada masalah disitu sebenarnya tapi yang merugikan negara sebenarnya itu

adalah para pengusaha-pengusaha yang mitra kerja dengan PT. Timah yang bermitra dengan PT. Timah ini yang merugikan negara sebenarnya. Nah kalau saya minta supaya itu diusut siapa para pengusaha-pengusaha di balik itu semua intelektual kadernya siapa dan bagaimana modusnya pasti terbongkar Pak ketika integritas di kedepankan ketika tidak ada pertemanan disitu sulitnya ketika pertemanan ini tidak bakal terbongkar apalagi ketika misalnya yang menempatkan Bapak Ibu dalam posisi itu kan para pengusaha-pengusaha ini kan menempatkan orang-orang di Kepolisian ini bagaimana supaya usahanya aman lobby kiri kanan menempatkan seseorang Kepolisian, tempat tangkap Polda supaya aman usahanya disitu, tempatkan siapa di Porlantas supaya aman proyeknya, tempat kan begitu tujuannya, itu tidak kita inginkan.

Nah saya juga mengapresiasi tadi Pak Kaba bahwa setiap proses sidik dalam kaitan menyangkut masalah tambang ini betul-betul. *Money laundry* saya kira ini sangat bagus sekali dalam rangka untuk pengembalian kerugian keuangan negara. Saya kira ini beberapa hal yang saya sampaikan Pak ini fokus kita adalah sumber daya alam Pak Kaba dan saya menghargai paparan yang Bapak sampaikan tadi. Terima kasih.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA TIM PANJA (Dr. Ir. ADIES KADIR, S.H., M.Hum.):

Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh

Baik, Pak Habib masih ada?

F-PKS (HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI, SE):

Saya.

KETUA TIM PANJA (Dr. Ir. ADIES KADIR, S.H., M.Hum.):

Waktu ya. Habib Aboe Bakar dulu baru Pak Habibuokhman.

F-PKS (HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI, SE):

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Terima kasih Ketua.

KETUA TIM PANJA (Dr. Ir. ADIES KADIR, S.H., M.Hum.):

Bib, waktu ya Bib.

F-PKS (HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI, SE):

Iya.

Ketua yang saya hormati makasih
Mitra yang saya hormati juga

Selamat ulang tahun Pak, 74 tidak terasa semakin matang semakin dewasa. Semoga bisa selalu mengayomi melindungi dan menjaga masyarakat kita dan semakin humanis Pak. Cuma jangan slogan, benar-benar gitu dirasakan humanisnya itu, humanis sebenarnya.

Yang kedua rasa promoter itu juga jangan hanya sekedar ide ya, jadi sedikit perlu sesuai dengan kalimatnya ya, promoter. Modern terpercaya dan professional.

Pak Kaba yang saya hormati dan jajarannya

Saya lihat memang hari ini Komisi III sangat menarik dengan cara kerja seperti ini agak lebih dalam dan lebih fokus kepada permasalahan kami Pak karena cinta Polri Pak bukan karena kami benci Bapak-bapak ingin mengevaluasi, tidak, tidak saya bukan menggali-gali sampah Pak. Kami-kami ini ingin bersama-sama bermitra mari kita bangun Republik Pak dengan baik, ini maksud kita. Saya *respect* sekali dari pengantar Pak Desmond tadi, Pak Benny, saya pikir Pak Benny bicara sudah dari hati itu Pak bukan berarti Bapak-bapak cacat jelek, bukan, mari kita benahi, ayolah kita mau-mau kerja tidak sih kalau kita memang kita mau cari uang kita mau kaya kita mau usaha semua juga kepengen Pak asal benar tidak ada masalah. Si pengusaha tambang Villa apa Bima apakah ikan, hutan kalau dia bayar pajak benar dia apa semua dia kaya dia ya tidak apa-apa dia sah, dia bayar zakat juga dia bayar pajak juga dia benar juga tidak nipu emang salah? Tidak, iya, iya itu karakter kita memang senang berbagi Pak ya karena ada kaidah Pak saling berbagi saling cinta itu tuh kaidah *tahaddu tahabbu* ya.

Pak Kaba saya hormati

Laporan Bapak bagus Pak cuma kalau saya lihat dari tema-tema besar karhutla lah, DIM apa apa tadi migas, satgas itu pun kalau angka-angkanya tidak berselera saya melihatnya Pak kalau laporannya bagus angkanya tidak tidak pantas sebagai kita dengan situasi yang sebenarnya maka itu mungkin yang membuat galian dari kawan-kawan tadi begitu dalam. Pak sangat transparan Pak yang Bapak kerjakan di lapangan, kami-kami di DPR juga tidak bodoh-bodoh amat melihat peta-peta lapangan Pak. Pater-pater juga bercerita makanya kita jangan sampai satu sama lain kita saling mengisi kita saling memperbaiki kita juga ada kelemahan Pak DPR bukan tidak ada mungkin kalau Bapak bercerita juga banyak begitu tapi kita juga cari-cari titik temu ah itulah pengantar pertama.

Yang kedua izinkan saya juga mengapresiasi kinerja Bareskrim ya dalam penanganan penyelundupan benih lobster Pak kaget-kaget kita ketemu ... (suara tidak jelas) benih lobster ya salah satu atau terjadi Tipidter Bareskrim mana Tipidter mana orangnya Pak siapa nih? *Good*, mantap ya. Polri bersama dengan Balai KIPM Jakarta II Babinsa TNI Angkatan Laut ya yang kemarin Sabtu dilepaskan di Pamulang ini menunjukkan menurut saya

Bareskrim terus bekerja dalam perlindungan SDA kita ya, ini baru salah satu contoh nih Pak yang muncul.

Kemudian kalau kita penanganan Bareskrim di Sultra Pak juga demikian 2019-2020 sekiranya kita catat ada 10 perkara UP ya yang ditangani Bareskrim, berarti lah Bareskrim bekerja ya Pak, bekerja itu jelas itu ya yang ditangani Bareskrim ini berarti Bareskrim secara, namun kalau kita lihat Tim Tipidker baru meletakkan 3 tersangka yaitu Direktur PT. PNM, PT. MPM, Direktur PT. RMI. Nah kalau kita lihat banyaknya itu-itu permasalahan di sana ada pula 1 orang Pak yang yang bisa mengusai 10 IUP ya saya kira ini semua perlu dialami karena penerimaan negara itu kan bukan pajak saja Pak ya bahkan menurut aturan yang baru tarif iuran tambang naik 2 kali lipat 5% menjadi 10% tentunya saya pikir ini perlu di dalam lah ya. Saya rasa soal IUP ini bisa menjadi pintu masuk Pak perlu di dalam potensi kebocoran anggaran disana Pak Kaba kenapa itu permasalahan tidak ditertibkan oleh Pemerintah Daerah saya kira ini perlu juga dalam oleh Bareskrim ya.

Selain itu Pak Kaba pada Maret kemarin Tipidker Bareskrim dan Polri Polda Sultra melakukan penyenggolan terhadap 7 perusahaan tambang benar Pak Tipidker ya yang berada di Kabupaten Konawe Utara, Konawe ramai terus nih Pak tidak di TKA ini terus Konawe ini hangat benar, TKA tidak ada habis-habisnya lagi ceritanya sudah kayak paling benar saja itu ya datang terus China-China itu ya karena ada di koran di majalah terbuka itu tapi tidak ada yang bisa lawan itu Pak saya lihat selamat terus itu ya, ah siapa itu dibelakangnya tapi saya pikir Bareskrim kudu panggil orangnya tuh ya. Ke 7 perusahaan itu Pak saya kan catat PNM PT. Bososi Pratama, PT. RMI, PT. MPM, PT. AMPA, PT. Jalur Mas, PT. TNI nah ini semua menyiapkan ...(suara tidak jelas) operasional dengan PT. Borosi, Bososi maksud saya. Iya tapi menambang di luar PT. Arya Bososi ini hangat benar nih Pak ya. Nah, perkembangan terakhir saya membaca bahwa Bareskrim menetapkan rektur RMI, rektur PNM, rektur MPM ini ada pertanyaan lagi jadinya ya kenapa perhatiannya kepada perusahaan itu saja gitu ya kenapa juga PT. Bososi tidak kena kok gitu padahal itu sumbernya kenapa yang lain juga tidak diproses. Ya tolong berikan penjelasan mungkin Pak Kaba atau sesuai bidangnya sejauhmana proses perkara ini. Ini terus terang Pak mendapat atensi publik loh ya bukan cuma masyarakat Ombudsman juga menyoroti ini. Jadi saya minta ditangani secara professional dan transparan.

Pak Kaba yang saya hormati dan jajarannya

Terus terang saja benar apa yang dikatakan Pak Benny saya terus terang respect dengan keterbukaan Pak Benny kalau ketika berbicara tuh lugas jelas dan lantang ayo buka-bukaan coba kayak gitu kan sudah jarang-jarang Pak ya yang dibuka bukan-bukan sehari lah pasti bukan ya buka ...(suara tidak jelas) dua koper dia bawa Pak, itu tidak main-main itu Pak. Kalau Bapak iseng bawa kesini dua kopernya, tantang saja Pak. Ben keluarin Ben ada tidak Ben, ah gitu dong jadi biar *clear* gitu, kita bukan saling tantang menantang kita ini ingin baik Pak, kita mau benar toh kita rezeki bareng-bareng dibagi bareng-bareng sama-sama begitu kita olah baik-baik itu tetapi tidak merugikan negara gitu, oh iya dong, gila, jarang merugikan negara.

Pak mohon maaf ya dalam Islam Pak orang kaya sekaya-kayanya boleh Pak asal sesuai pembayaran zakatnya, tidak masalah ya ayatnya ...(suara tidak jelas) Ambil harta itu dan bersihkan semuanya itu *clear* jadi kalau istilah batubara barang Tuhan bagi rata itu cuma bercandaannya benar Pak salah, memang lu punya apa, punya batubara? Memang punya lo? Tidak juga gitu. Nah maksud saya Pak yang Bapak sebutkan tadi ini nih harta benda kekayaan Allah semua Pak kekayaan Tuhan semua nih kita cuma numpang ngambil doang. Nah maka itu, jadi punya negara masa satu orang punya semua tanah di Indonesia, punya tambang semua di Indonesia cuma 1 orang ini siapa ini dia, malaikat siapa ini gitu tidak tahu saya.

Jadi mohon Pak Kaba saya pikir ini suasana yang bagus Pak biar rapat sikit ini Adies dengan gaya lembutnya, Desmond dengan tidak ada kenceng-kenceng, Pak Benny juga pelan tapi juga enak-enak mari kita buka sama-sama, Sudding juga kadang ya jadi dierat 74 ...(suara tidak jelas) Polri ini ada suasana yang berselera keterbukaan bersama tidak ada yang ...(suara tidak jelas) kita berceritanya dialog sudah berapa kali kita ketemuan Kaba dengan dialog yang sangat terbuka saya respect juga Pak, jarang-jarang kita kayak begini. Biasanya tegang-tegangan, main ancaman-ancaman, main tangkap-tangkapan, kan tidak benar kayak begitu dan era sekarang ini menurut saya era promotor, era zamannya Idham Azis dengan Pimpinan dan semua jajarannya mari kita bikin Indonesia lebih baik. Selamat Dirgahayu 74.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Terima kasih Ketua.

KETUA TIM PANJA (Dr. Ir. ADIES KADIR, S.H., M.Hum.):

Terima kasih Pak Habib Abdul Rahman, mohon maaf, Habib Aboe Bakar Alhabsyi.

Bapak Ibu sekalian

Tadi kita 15.30, ini sudah 15.30 lebih, kita satu orang lagi ya Pak Habiburokhman. Kita perpanjang 15 menit, nanti yang lain-lain kita akan perdalam di Komisi. Pak Kabareskrim dijawab saja tertulis nanti semuanya biar nanti kita pendalaman khusus di Komisi karena waktunya sudah tidak mencukupi. Pak Habiburokhman.

F-GERINDRA (HABIBUROKHMAN, S.H., M.H.):

Iya terima kasih.

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pak Kabareskrim
Pak Wakabareskrim beserta jajarannya
Pimpinan Komisi III

Ketua Panja Penegakan Hukum Komisi III dan rekan-rekan Anggota

Selamat siang

Inti dari Panja ini semangatnya saya pikir itu apa yang tercantum di Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 bagaimana mendatangkan pendapatan negara yang sebesar-besarnya jadi kita ke depan dalam kerjanya Panja ini perlu satu suara bahwa bukan hanya persoalan-persoalan *business illegal mining*, *illegal drilling*, *illegal fishing* saja tapi yang legal pun pernah dan bermasalah secara hukum itu harus kita sikapi secara serius. Saya mau kasih contoh ya ini legal tapi penuh nuansa pelanggaran hukum penanaman modal Gulaku atau Sugar Group di Lampung ini bahkan menjadi mitos Pak Kabareskrim bahwa yang bersangkutan bisa melakukan apa saja tanpa tersentuh hokum. Saya sudah klasifikasi *cluster*-nya mulai dari HGU bermasalah, kemudian tidak jelas luas area HGU-nya itu tidak jelas ya ujung-ujungnya itu kan PPPO, pelanggaran hak warga, perebutan tanah warga, pelanggaran hutan register atau hutan lindung, pencemaran lingkungan ya dan macam-macam belasan tahun tidak tersentuh bahkan korporasi yang bersangkutan dimitoskan *super power*, super PPOC Pak, bukan hanya menguasai sektor ekonomi tapi jugapolitik. Konon kabarnya Kepala Daerah kalau mau jadi mau memang mesti lewat mereka kalau tidak kalah kalau sudah-sudah jadi pun kalau mau terus lanjut mesti lewat mereka kalau tidak kalah diganti.

Terakhir ada satu kasus ya ini yang bersangkutan kita baca menjadi terlapor di Polri, kasus Makindo Pak. Nah, kita juga tidak tahu infonya itu sejak tahun 2018 atau bolak-balik antara Bareskrim dan Kejaksaan. Nah, kemudian tadi yang kedua soal tantangan Pak di bidang *illegal mining* dikatakan area yang *remote*, kemudian PT itu yang melibatkan rakyat kecil bukan rakyat kecilnya saya pikir, penampungnya Pak pengepul-pengepulnya yang-yang harus kita sikapi secara tegas. Nah, yang agak kurang Pak tadi diulas adalah keterlibatan oknum Pak kita paham kemarin sempat ya katakannya teman-teman penyidik dari Jakarta langsung tiba-tiba di tengah Covid naik pesawat khusus latar belakangnya kita paham karena kalau datangnya diketahui ya sudah selesai berartikan ada oknum disitu Pak. Nah, itu tantangan Bapak selaku Kabareskrim.

Soal karhutla tadi dikatakan kesusahan mencari saksi itu juga terjadi di negara-negara lain Pak tapi *trend*-nya pembuktian kasus-kasus karhutla ini sekarang ini mengarah juga ke *indirect evidence* bukan sekedar *direct evidence* saksi-saksi konvensional tapi *indirect evidence* adalah misalnya studi ya dari keterangan ahli dan lain sebagainya. Kalau misalnya satu perusahaan lahannya terbakar ya pasti perusahaan itu harus tanggung jawab karena tanggung jawabnya di lokasi yang situ tidak perlu lagi terlalu cari satu orang siapa yang mengakibatkan kebakaran dan lain sebagainya susah namanya hutan ya hutan tentu jauh dari masyarakat. Mungkin itu dari saya terima kasih.

Billahi Taufik Wal Hidayah

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA TIM PANJA (Dr. Ir. ADIES KADIR, S.H., M.Hum.):

Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh

Cukup ya kawan-kawan. Pak Kabareskrim kami persilahkan untuk memberikan *closing statement*-nya yang lain-lain mungkin dijawab tertulis saja nanti Pak silakan Pak.

KEPALA BARESKRIM (Komjen. Pol. Drs. LISTYO SIGIT PRABOWO, M.Si.):

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Mohon izin sebenarnya tadinya kami akan menjelaskan secara *detail* khususnya terkait dengan masalah penanganan dan situasi yang terjadi di Babel dan juga yang tadi ditanyakan oleh Pak Habib terkait dengan masalah Sultra karena memang ini perlu saya jelaskan secara transparan. Mohon izin Pak kami diberi waktu berapa banyak sehingga kami bisa jawab mana yang secara global, mana *detail* dan kemudian juga terkait dengan masalah karhutla.

KETUA TIM PANJA (Dr. Ir. ADIES KADIR, S.H., M.Hum.):

Silakan Pak kita perpanjang sampai jam 16.00 WIB. Setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

Baik, sampai jam 16.00 WIB Pak.

KEPALA BARESKRIM (Komjen. Pol. Drs. LISTYO SIGIT PRABOWO, M.Si.):

Baik, terima kasih.

Secara umum kami mengucapkan terima kasih bahwa dari beberapa penyampaian Bapak-Bapak yang mulia tadi mulai dari Pak Arteria, kemudian Pak Benny Karman, Pak Sudding, dan kemudian Pak Habib, Pak Habiburokhman. Ada beberapa catatan penting yang-kemudian ini akan menjadi pedoman kami Pak khususnya di dalam hal penanganan kasus-kasus yang terkait dengan masalah kekayaan negara ini. Jadi kami tentunya sangat-sangat berterima kasih kalau kami didukung untuk melaksanakan penegakan hukum ini secara tuntas termasuk juga kalau kami mungkin boleh memproses TPPU-nya termasuk ya tentu saja orang-orang yang terkait di dalamnya kami siap untuk itu karena itu yang kami tunggu.

Namun yang jelas Pak kami juga memahami yang negara kita saat ini sedang membutuhkan dukungan dalam rangka pemilihan-pemilihan ekonomi nasional terjadi pertumbuhan ekonomi yang sangat melambat dan kami juga ingin bahwa dengan melakukan pengawalan khususnya penegakan hukum di bidang sumber daya alam ini paling tidak ini bisa menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi untuk bangsa dan negara kita karena kita menyadari juga bahwa ini adalah salah satu aset yang kita miliki yang apabila ini bisa

kita kelola dengan baik maka pertumbuhan ekonomi walaupun waktu kita tinggal sebentar di tahun 2020 mudah-mudahan ini bisa maksimal dan tentunya terkait dengan masalah yang ilegal-ilegal tadi Pak kami siap untuk melaksanakan pemberantasan tersebut Pak. Kami dalam posisi yang tidak pernah mau bermain-main dengan yang ilegal-ilegal. Mohon maaf sampai sekarang kami tidak kenal yang namanya ilegal-ilegal itu jadi buat kami tidak ada keraguan untuk kami tabrak mereka apalagi mendapatkan dukungan dari Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian yang ada di depan kami dan ini menjadi pegangan kami untuk kedepan.

Kemudian terkait dengan keterlibatan oknum Pak, mohon izin, prinsipnya kami siap Pak kalau memang ada Anggota kami yang kemudian terlibat didalamnya tidak bisa kami perbaiki ya tentunya pilihannya dia pindah dari Bareskrim kemudian diproses Propam seperti itu. Itu adalah sanksi-sanksi yang kami dihadapi oleh Anggota-anggota kami dan khusus itu kami tidak akan melindungi Pak kami terbuka kalau memang ada nama-namanya kami akan serahkan ke Propam untuk di dalami kalau memang ada keterlibatannya kita akan proses. Posisi kami seperti itu, jadi kami tidak ragu-ragu untuk masalah bagaimana memperbaiki performa Bareskrim kami juga membuka pengaduan secara *online* sehingga pengaduan-pengaduan tersebut bisa kami tindak lanjut ini juga bagian dari upaya kami untuk memperbaiki *performance* dari Bareskrim bagaimana kita sanggup tampil sebagai penegak hukum yang professional, humanis, dan tentunya kami juga menghindari hal-hal seperti tadi disampaikan sampai kami ikut-ikutan membackup yang ilegal-ilegal dan kemudian kami menikmati dari hal tersebut kata Habib tadi itu tidak-tidak barokah tetapi begitu Pak, Bib makasih Bib.

Mohon izin Pak mungkin kami masuk kepada materi yang terkait dengan masalah Babel Pak, ini juga tentunya kami sebenarnya tidak mau membuka ini Pak tapi mohon izin kalau boleh kami buka sedikit-sedikit saja Pak. Sedikit-sedikit bagaimana Babel dulu dan setelah ada proses penindakan oleh Kepolisian Babel saat ini Pak tentunya ini menjadi perhatian kita semua. Mohon izin Pak kami ceritakan dulu Babel khususnya terkait dengan masalah Timah karena memang Timah ya ada di Bangka Belitung ini adalah salah satu atau mungkin terbesar kedua di dunia dengan kontribusi sebesar 26%. Kemudian dari data IUP PT. Timah tolong websitenya dari data yang ada kurang lebih tercatat ada 714 IUP dimana 550 adalah yang aktifkan dan 164 IUP yang tidak aktif masa berlakunya. Kemudian dari IUP-IUP tersebut di lapangan sebagian besar potensi-potensi tersebut hampir rata-rata tidak sehingga kemudian banyak mereka yang bekerja di IUP-nya PT. Timah. Mungkin ada beberapa gambar disitu dimana beberapa waktu yang lalu banyak kegiatan-kegiatan ilegal yang dilakukan di Bangka Belitung mulai dari kegiatan penambangannya pengepulannya sampai dengan pengangkutannya serta juga dampak terkait dengan masalah lingkungan itu sendiri.

Kalau kita lihat dari pola pelaku *illegal mining* di sana jadi bagaimana masyarakat yang mengambil dari IUP PT. Timah kemudian mereka menjual kepada pengepul, kemudian pengepul itu menjual kepada smelter swasta atau dari masyarakat langsung menjual pada smelter swasta itu terjadi beberapa waktu yang lalu sehingga kalau kita lihat dari history ekspor logam

timah tahun 2008 sampai 2018 terlihat bahwa perbandingan kuota ekspor smelter yang swasta itu lebih besar daripada PT. Timah Tbk dengan kondisi sebenarnya dimana sebenarnya PT. Timah Tbk itu pemilik terbesar. Disitu kita lihat grafiknya yang warna kuning, yang warna kuning itu adalah presentase PT. Timah dimulai terjadi kenaikan itu di tahun 2018 pada saat dilakukan upaya penertiban dan penegakan hukum sehingga terjadi kenaikan terkait dengan masalah presentase hasil dari PT. Timah 40% dari yang sebelumnya 34% kemudian di tahun 2018 40% dan di tahun 2019 naik menjadi 98% dimana komposisinya 665.640.000 metrik ton itu diproduksi oleh PT. Timah dan 1.500 oleh swasta jadi mengingat adalah hasil dari penyelundupan tambang timah ilegal. Di dalam perjalanannya tentunya ada proses-proses tahapan pelayanan dan penanganan mulai dari kegiatan sosialisasi, kemudian penindakan oleh Polri baik yang di Polda maupun penindakan yang dilakukan oleh Polri dari Mabes. Tolong *slide*-nya.

Ada beberapa kasus yang kemudian ini menjadi catatan kami ada 3 kasus yang ditangani 2 selesai yaitu PT. DS Jaya Abadi ini terkait dengan menambang pasir timah yang bukan dari IUP-nya barang bukti timahnya sekitar 75 ton yang sudah diproses. Kemudian yang kedua PT. Panca Mega Persada ini juga sudah terproses dengan baik dan sudah P21 dimana ada pasir timah 88 ton, kemudian batangan timah 15 ton, kemudian 50 ton lagi yang ada di gudang dan 2 unit forklift serta 20 batang. Selanjutnya PT. AKS nah ini juga ini juga sebenarnya sampai sekarang belum-belum tuntas karena memang ada beberapa-beberapa hal yang masih kami jalani yang muncul adalah masalah terkait dengan masalah pemalsuan dokumen namun disatu sisi ada informasi bahwa yang bersangkutan telah melengkapi RKAB sehingga kemudian ini yang kemudian kami lihat menjadi masalah-masalah besar yang-yang kemudian menimbulkan friksi yang kalau kami lihat sampai saat ini belum selesai.

Ini saya cerita yang bagus dulu Pak dari top 10 besar perusahaan logam timah dunia maka selanjutnya ada peningkatan ada peningkatan di tahun 2018 itu produksinya dalam metrik ton 33.400 metrik ton di 2019 naik menjadi 76.400 metrik ton artinya bergeser dari yang tadinya nomor 1 nya adalah Yunnan Tin China di tahun 2018 maka di tahun 2019 PT. Timah menjadi nomor 1 kenaikannya 129% sementara Yunnan Tin turun menjadi 7% ini-ini yang bagus Pak. Kemudian kalau kita lihat dari grafik produksinya ini juga kita lihat begitu ada kegiatan pelaksanaan penertiban maka terjadi kenaikan produksi baik dari PT. DS di bulan November namun di bulan Juni 2019 juga terjadi kenaikan yang cukup tinggi namun di bulan Juli, Agustus, September sampai dengan Desember ini terjadi penurunan. Demikian juga dengan hasil logamnya atau produksinya ini ada terjadi penurunan.

Mencermati apa yang tadi disampaikan oleh beberapa rekan-rekan terkait dengan situasi terkini yang terjadi di zaman terjadi di Babel. Gampang terjadi penurunan produksi dan kemudian itu semakin menjadi masalah manakala masuk dalam kondisi ekonomi di tengah pandemi Covid ini yang mengakibatkan kelesuan yang kemudian ini menjadi masalah di wilayah Babel karena memang di wilayah Babel kehidupan masyarakatnya sebagian

besar memang hidup dari operasional dari kegiatan timah baik itu smelter swasta maupun smelter yang ada di PT. Timah.

Pada saat awalnya semuanya bagus Pak namun kemudian muncul isu di belakang dan ini-ini kami turunkan gitu ya untuk turun ke sana dimana asal muasal masalahnya ini karena ada beberapa stock timah kurang lebih 1.000 ton yang berada di smelter-smelter yang tidak bisa di ekspor karena tidak bisa terbit RKAB. Ini stock timah yang ada ini adalah stock-stock yang berada di kurang lebih 30 smelter yang tidak bisa beroperasi yang diproduksi pada saat sebelum terjadi penertiban sehingga kemudian muncul, muncul isu telah terjadi oligopoli terkait dengan penerapan putusan nilai SDM dimana ketentuan tersebut mempersyaratkan harus ada penilaian CPI. Sementara di wilayah lain penilaian CPI ini tidak menjadi keharusan mutlak karena sumber daya cadangan dalam RKAB sudah mengacu pada studi kelayakan jadi permasalahannya yang terus-menerus kemudian muncul juga banyak sekali aksi-aksi yang terjadi di lapangan sehingga kemudian mau tidak mau ini menjadi permasalahan yang harus dipecahkan.

Kemudian muncul masalah di satu sisi Anggota yang awalnya melakukan penegakan hukum namun kemudian di dalam perjalanannya dianggap selalu kreatif ataupun represif sehingga kemudian dianggap menguntungkan lima konsorsium yang bekerja sama dengan PT. Timah untuk melakukan produksi jadi setiap ada kegiatan dari smelter yang lain anggota kami dianggap selalu menghalang-menghalangi dan melakukan penangkapan-penangkapan yang seharusnya tidak perlu dan ini dianggap terlalu berat sebelah. Ini adalah situasi-situasi yang terjadi di lapangan yang sebenarnya sumber asal muasalnya adalah karena masalah yang tadi saya sampaikan situasi ekonomi sedang tidak bagus, ada 1.000 ton Timah yang ada di smelter-smelter ini jual RKAB-nya tidak bisa keluar itu masalahnya. Di satu sisi ada 5 (lima) perusahaan yang bisa bekerja karena ada kerja sama dengan PT. Timah mereka melihat yang ini kenapa bisa kerja sementara saya punya timah tidak bisa di jual itu masalah utamanya seperti itu.

Beberapa waktu yang lalu kami sudah mencoba untuk melakukan diskusi khususnya dengan PT. Timah karena memang kalau ini tidak diselesaikan ini menjadi masalah-masalah kedepan yang dikemudian hari ini akan terus-menerus terjadi sehingga kemudian dari hasil diskusi tersebut kami tanyakan kepada PT. Timah apakah hanya lima konstruksi yang tersebut yang bisa bekerja apakah ada peluang bagi yang lain yang mengikut bekerja untuk bisa diberikan kesempatan dari PT. Timah sebenarnya menyampaikan bahwa tahun depan produksi kami akan kami tingkatkan sehingga kami tidak menutup kemungkinan untuk bermitra dengan yang lain juga. Nah, tentunya ini ya sebenarnya menjadi satu kemajuan yang bagus sehingga tentunya masalah-masalah kedepan dikemudian hari munculnya isu monopoli dan sebagainya ini bisa diatasi dan yang paling adalah bagaimana kemudian ekonomi di Provinsi Bangka Belitung ini bisa berjalan atau bisa bertumbuh dengan lebih baik karena memang disana ada potensi yang luar biasa yang kalau memang itu bisa di kelola dengan baik tentunya ini akan menimbulkan *multiplayer effect* untuk masyarakat *stakeholder* yang ada

Pemerintah Daerah sehingga ini bisa mengangkat pertumbuhan ekonomi yang ada.

Oleh karena itu, saran kami terkait dengan hal ini tentunya bahwa terkait dengan 1.000 ton timah yang saat ini ada ini tentunya memang perlu ada suatu keputusan khusus karena di satu sisi kalau dicari itu sumbernya darimana mereka pasti tidak berani membuktikan dia membeli barang darimana tapi di satu sisi dari kami dari dua kasus yang kita tangani putusan pengadilan barang itu juga dikembalikan ke smelter-smelter yang kita sita, jadi ini menggantung begitu tidak bisa nyita untuk kemudian kita jual agak yurisprudensi yang itu kembali kepada perusahaan *recruit* tapi disisi lain ini kemudian jadi masalah ini yang mungkin ini barangkali yang bisa nanti di dalam oleh rekan-rekan dari Panja pemecahannya seperti apa. Kemudian juga kalau memang dari PT. Timah kemudian bisa memproduksi lebih banyak untuk di jual ke pasar internasional berarti ada peluang juga untuk smelter-smelter yang memenuhi syarat untuk kemudian diberikan kesempatan dengan tidak mengganggu smelter-smelter yang sebelumnya pernah bermitra. Mungkin itu salah satu yang bisa menjadi pemecahan dikemudian hari yang tentunya ini perlu di ditindak lanjuti oleh Panja.

Mungkin itu yang terkait dengan masalah nikel yang bisa kami sampaikan di dalam temuan kami yang mungkin bisa ditindak lanjuti oleh Panja sehingga kedepan tidak lagi menjadi masalah kemudian muncul permasalahan-permasalahan di kami di internal. Karena juga ini kalau dibiarkan terus menerus akan-akan berdampak yang kurang baik buat-buat institusi dan juga tentunya buat situasi *stakeholder* yang ada di *table* itu sendiri apalagi kemudian juga ada temuan-temuan yang tentunya kalau ini dibiarkan terkait dengan masalah harga jasa pihak ketiga ini juga sedang di audit oleh BPK ini juga tentunya kalau tidak diantisipasi akan jadi masalah karena sudah ada audit tertentu juga. Tentunya hal-hal ini yang kemudian akan menjadi temuan hukum kalau-kalau kalau kita tidak menanganinya dengan baik dan seperti tadi disampaikan kalau ini kita biarkan akan memunculkan masalah-masalah dikemudian hari. Itu terkait dengan PT. Timah yang di Babel terkait dengan masalah Timah yang di Babel.

Kemudian yang kedua terkait dengan masalah penegakan hukum khususnya terkait masalah hutan lindung. Mohon izin.

F-PAN (SARIFUDDIN SUDDING, S.H., M.H.):

Izin Pimpinan.
Pimpinan, izin Pimpinan.

KETUA TIM PANJA (Dr. Ir. ADIES KADIR, S.H., M.Hum.):

Sebentar Pak biar diselesain dulu Pak.

F-PAN (SARIFUDDIN SUDDING, S.H., M.H.):

Ini menyangkut masalah PT. Timah dulu sebentar Cuma satu pertanyaan dulu menyangkut masalah praktik oligopoli tadi karena ini kan menjadi persoalan buat masyarakat yang ada di Bangka.

Pak Kaba, saya kira.

KETUA TIM PANJA (Dr. Ir. ADIES KADIR, S.H., M.Hum.):

Waktunya Pak Sudding ya.

F-PAN (SARIFUDDIN SUDDING, S.H., M.H.):

Iya sebentar.

Pak Kaba, saya kira Bapak sudah mengelaborasi persoalan yang ada di timah dan saya kira memang itu persoalannya praktik oligopoli itu yang terhadap PT. Timah dan berapa perusahaan dan ini tidak memberikan jaminan harga terhadap masyarakat yang ada di Bangka Belitung dan itu jadi persoalan sebetulnya. Nah apakah ada terobosan yang bisa dilakukan oleh Pak Kabareskrim dalam rangka untuk untuk menjamin masyarakat penambang yang ada di apa namanya yang ada di Bangka Belitung supaya persoalan ini tidak diibaratkan api dalam sekam gitu dan ini bisa meledak Pak setiap satu bisa meledak persoalan-persoalan yang ada di masyarakat dalam kaitan menyangkut masalah penambang timah yang ada di Bangka Belitung ini saya kira praktik oligopoli itu kayak menjadi persoalan ya diberikan kepada PT. Timah dan 5 konsorsium yang ada disitu sehingga tidak memberikan rasa keadilan buat masyarakat yang ada di Bangka Belitung itu sendiri.

KETUA TIM PANJA (Dr. Ir. ADIES KADIR, S.H., M.Hum.):

Baik, Pak Sudding nanti kan hari Kamis kita kesana sekalian kita dalam saja disana nanti baru kita diskusi lagi dengan Pak Kaba, begitu Pak Kaba ya? Baik. Terima kasih cukup Pak Kaba? Ada lagi?

KEPALA BARESKRIM (Komjen. Pol. Drs. LISTYO SIGIT PRABOWO, M.Si.):

Siap terima kasih Pak mungkin satu tambahan saja karena waktunya sudah mepet prinsipnya Pak kami tadi sudah memberikan masukan ada pemecahannya Pak dari PT. Timah memberikan kesempatan untuk kepada smelter swasta yang lain juga kalau mau bermitra karena memang di tahun 2021 itu mereka akan meningkatkan produksinya sehingga kemudian tidak hanya 5 konsosium tapi tentunya akan menambah tentunya skema ini nanti bisa didiskusikan prinsipnya kami mencoba untuk mengurailah permasalahan disana supaya ini jangan *stuck*. Kemudian terkait lagi Pak dengan masalah-masalah timah yang namanya ini yang sampai saat ini tidak bisa terjual Pak mungkin perlu reaksasi Pak karena memang di tempat-tempat lain apakah ini kemudian dengan persetujuan karena memang situasi yang ada itu bisa dimunculkan RKAB kemudian di jual kepada PT. Timah barangkali atau

kepada pihak-pihak yang memang terkait yang bisa menambang itu tapi prinsipnya harus ada pemasukan jangan merugikan yang punya barang dan jangan juga merugikan darimana asal barang tersebut berada ini tentunya perlu ada duduk bersama Pak supaya kedepan tidak ada masalah ini lagi semuanya bisa hidup namun tentunya disesuaikan dengan proporsionalnya masing-masing. Mungkin itu Pak yang bisa kami tambahkan karena kalau ini tidak bisa tuntas Pak pasti akan ada masalah-masalah dikemudian hari yang tentunya saya-saya pikir itu jangan sampai terjadi.

Kemudian terkait masalah penanganan di Sultra Pak rata-rata yang kami tangani adalah kasus-kasus yang terjadi di hutan lindung yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu bahwa kita dibatasi tapi mohon izin Pak ada 7 yang kami tangani disana dan ini kami pastikan akan kami tetapkan menjadi tersangka termasuk juga terkait dengan alat-alat yang kita sita termasuk dengan OR yang kita sita itu pasti akan kita lelang dan kita serahkan kepada negara dan itu akan kita lakukan secara transparan intinya kami tidak mau ngumpat-ngumpat Pak kalau masalah yang beginian karena semua orang juga tahu kalau kami ngumpat-ngumpat dan kemudian ada yang kami umpetin juga akan jadi masalah juga.

Kemudian masalah Gulaku Pak mohon izin prinsipnya ada beberapa laporan ke kami dan sekarang semuanya masih berproses jadi terima kasih atas dukungan dari Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian prinsipnya kami mencoba Pak untuk bisa melakukan penegakan hukum secara baik walaupun ada yang menakut-nakuti kami punya mitra-mitra kami di Komisi III yang selalu membantu kami untuk melawan yang menakut-nakuti kami. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA TIM PANJA (Dr. Ir. ADIES KADIR, S.H., M.Hum.):

Walaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh

F-PDIP (MASINTON PASARIBU):

Ya Pimpinan, Pak Adies.

KETUA TIM PANJA (Dr. Ir. ADIES KADIR, S.H., M.Hum.):

Baik.

F-PDIP (MASINTON PASARIBU):

Pak Adies.

KETUA TIM PANJA (Dr. Ir. ADIES KADIR, S.H., M.Hum.):

Cukup ya?

F-PDIP (MASINTON PASARIBU):

Masinton, Pak Adies.

KETUA TIM PANJA (Dr. Ir. ADIES KADIR, S.H., M.Hum.):

Berapa menit Ton 1 menit ya.

F-PDIP (MASINTON PASARIBU):

Tiga menit saja.

KETUA TIM PANJA (Dr. Ir. ADIES KADIR, S.H., M.Hum.):

Jangan 3 menit, 2 menit Ton, Masinton dulu Masinton dulu, 2 menit Ton.

F-PDIP (MASINTON PASARIBU):

Iya, terima kasih Pimpinan.

Pak Kabareskrim beserta jajaran Pejabat Utama di Bareskrim

Tadi saya melihat dan mendengar paparannya yang menurut saya bahwa penegakan hukum ini harus parallel dengan program negara khususnya dalam Undang Undang Dasar kita, pengelolaan kekayaan alam itu harus sebesar-besarnya kemakmuran rakyat kira-kira seperti itu. Nah tadi yang disampaikan Pak Kabareskrim berkait dengan adanya praktik oligopoli di Bangka Belitung dalam hal timah menurut saya itu satu terobosan yang dilakukan oleh Pak Kabareskrim berani menerobos praktik oligopoli itu ya karena apapun kalau kita lihat dalam situasi saat ini bukan hanya saat ini ya tapi ini momentumnya Pak relaksasi terhadap pelaku-pelaku usaha di sana ya di Bangka Belitung itu memang harus dilonggarkan Pak. Praktik oligopoli ini lah yang harus di tembus oleh Bareskrim sesungguhnya ini sebagai sebuah tonggak sejarah menurut saya buat Bangka Belitung nantinya jika mampu menembus sekat ini.

Nah, tentu tantangan tadi pasti akan datang kedepan. Nah, kita juga berharap nanti teman-teman Komisi III mampu *full mem-backup* tugas-tugas Kepolisian khususnya Bareskrim dalam mengatasi persoalan tambang di Bangka Belitung dan daerah-daerah lain. Nah inilah yang sebenarnya selama ini penegakan hukum kita itu kurang optimal dan tidak parallel dengan kehendak tujuan bernegara tadi itu, nah bagaimana penegakan hukum berpihak pada yang punya modal gitu ya nah dengan langkah-langkah seperti ini yang dilakukan oleh Kabareskrim beserta jajarannya menurut saya patut di apresiasi karena kita harus menerobos praktik-praktik oligopoli yang selama ini mengekang dan memiskinkan masyarakat di Bangka Belitung itu. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA TIM PANJA (Dr. Ir. ADIES KADIR, S.H., M.Hum.):

Baik, Pak Masinton terima kasih.

Kami Panja Komisi III percaya dan yakin Pak Kabareskrim, Wakabareskrim serta jajaran tentunya akan bertindak professional dan mencarikan satu penyelesaian yang sangat baik tentunya semua untuk kepentingan negara untuk pemasukan-pemasukan terhadap negara agar semua bisa terselesaikan dengan baik.

Bapak Ibu sekalian

F-PDIP (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.):

Ketua, Ketua, Ketua, Ketua, 1 menit Ketua.

KETUA TIM PANJA (Dr. Ir. ADIES KADIR, S.H., M.Hum.):

Terima kasih sekali lagi mohon maaf Bapak Ibu sekalian kalau ada hal-hal yang kurang kerkenan. Pak Arteria nanti kita lanjutkan di Komisi III saja setelah kita kunjungan ke Bangka Belitung.

Terima kasih mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan kami akhiri.

Billahi Taufik Wal Hidayah

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

(RAPAT DI TUTUP PUKUL 16.00 WIB)

Jakarta, 6 Juli 2020

a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

NOVIANTI, S.E.

NIP. 196711041988032001